



LAPORAN AKHIR

**ANALISIS
PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2011-2015**

KERJA SAMA

**BALAI STATISTIK DAERAH - BAPPEDA DIY
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DIY
TAHUN ANGGARAN 2016**

LAPORAN AKHIR

ANALISIS

PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DIY

2011 - 2015

KERJA SAMA
BALAI STATISTIK DAERAH BAPPEDA DIY
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK DIY
Tahun Anggaran 2016

Tim Penyusun

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif DIY, 2011-2015

Tim Pengarah	:	Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si (Kepala Bappeda DIY) Dra. Wrih Puji Rarasati (Sekretaris Bappeda DIY) Cahyo Widayat, SH, M.Si (Kepala BSD Bappeda DIY)
Penanggung jawab	:	Y. Bambang Kristianto, MA, M.Sc (Kepala BPS Provinsi DIY)
Editor	:	1. Dr. Evi Noor Afifah (Dosen dan Peneliti, FEB UGM) 2. Y. Sri Susilo, SE, M.Si (Dosen dan Peneliti, Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
Koordinator Penulis	:	Mainil Asni, SE, M.E. (Kepala Bidang NWA BPS Provinsi DIY)
Penulis	:	Mutijo, S.Si, M.Si (BPS Provinsi DIY) Dr. Ir. Kusriatmi, MP (BPS Provinsi DIY) Suryono, S.Si (BPS Provinsi DIY) Waluyo, S.ST, SE, M.Si (BPS Provinsi DIY) Gita Oktavia, S.Si, MA (BPS Provinsi DIY) Meitri Pafrida, S.Si, M.Ec.Dev (BPS Provinsi DIY) Fitri Puji Astuti, S.ST, MM (BPS Provinsi DIY) Nurita (BPS Provinsi DIY)
Desain	:	Mutijo, S.Si, M.Si
Dicetak Oleh	:	

Yogyakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Pusat Statistik Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016
x + 59 halaman, 21 x 29,7 cm

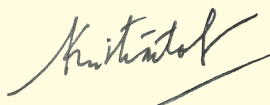
Kondisi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari indikator pertumbuhan ekonomi yang senantiasa positif. Pencapaian pertumbuhan tersebut hendaknya menciptakan peluang ekonomi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi inklusif (*Inklusif Growth*). Pertumbuhan inklusif harus inheren, berkelanjutan, mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Pertumbuhan inklusif memungkinkan seluruh individu ikut berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta telah inklusif, maka perlu dilakukan penghitungan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif (*Inklusif Growth Index-IGI*).

Publikasi Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif ini difokuskan pada pengukuran indeks inklusif yang dapat menggambarkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan dan implementasi pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di D.I. Yogyakarta.

Publikasi ini merupakan hasil kajian dan analisis pertumbuhan ekonomi inklusif untuk periode tahun 2011-2015. Oleh karena itu tentunya masih terjadi kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Tanggapan dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi ini di masa mendatang. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu maupun berpartisipasi lain dalam penyusunan publikasi ini.

Yogyakarta, Juli 2016

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi DIY



J. Bambang Kristianto, MA, M.Sc

Kata Pengantar

Kata Sambutan

Tantangan terbesar kondisi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini adalah tidak hanya mendorong agar ekonomi tetap tumbuh tinggi dan ekspansif tetapi juga pertumbuhan yang berkualitas. Seperti diketahui bahwa ukuran berkualitas itu diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan memperbesar ketersediaan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas bila semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian di D.I. Yogyakarta.

Capaian pertumbuhan yang berkualitas telah menjadi sasaran pembangunan daerah seperti termaktub dalam dokumen pembangunan RPJPD, RPJMD, dan juga RKPD. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta sudah semakin meningkat, namun perlu dikaji seberapa jauh kualitasnya.

Kajian Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif ini bermanfaat sekali bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan dan mengontrol langkah-langkah implementasi pembangunan dari tahun ke tahun terutama terkait dengan target capaian indikator pembangunan yang sudah ditetapkan. Selain itu, hasil analisis ini semoga juga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat dalam upaya kontribusinya dalam pembangunan.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya atas segala usaha yang telah dilakukan untuk menyajikan publikasi ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, baik dari unsur pemerintah daerah maupun narasumber dari akademisi untuk penyempurnaan hasil kajian analisis ini. Mudah-mudahan kerja sama antara BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta dengan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan selalu menghasilkan dokumen yang bermanfaat untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan dalam upaya yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Juli 2016
Kepala Bappeda DIY

Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si.

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah suatu proses pertumbuhan yang menjamin kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan masing-masing individu. Selama lima tahun periode, 2011-2015, pencapaian indeks komposit pertumbuhan ekonomi inklusif (*Inklusif Growth Index*, IGI) Daerah Istimewa Yogyakarta pada level memuaskan, dengan pencapaian indeks tertinggi pada tahun 2014 yaitu 6,45. Sementara untuk indeks tahun 2015 sebesar 6,35.

Pengukuran indeks komposit IGI diakumulasikan berdasarkan penghitungan 5 indeks dimensi, yang merupakan akumulasi penghitungan 10 sub-dimensi yang terdiri dari 27 indikator. Berdasarkan penimbang di setiap sub-dimensi, pencapaian angka indeks untuk lima dimensi dalam IGI di tahun 2015 diperoleh hasil dimensi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif, dan infrastruktur ekonomi mencapai indeks sebesar 3,01, dimensi kemiskinan dan ketimpangan sebesar 1,09, dimensi kesetaraan gender sebesar 0,44, dimensi kapabilitas manusia sebesar 1,30, dan dimensi perlindungan sosial sebesar 0,50.

Perbandingan IGI antarkabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta mencapai angka indeks tertinggi untuk semua tahun periode analisis, diikuti Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan terakhir Gunungkidul. Indeks IGI untuk Kulon Progo dan Gunungkidul berada di bawah rata-rata DIY, sedangkan Yogyakarta, Sleman, dan Bantul berada di atas rata-rata. Posisi urutan indeks tersebut juga konsisten untuk empat dimensi, sedangkan untuk indeks kesetaraan gender tertinggi di Yogyakarta, kemudian diikuti Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

Kualitas pertumbuhan ekonomi DIY masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan level pencapaian inklusivitas pertumbuhan dari memuaskan menjadi sangat memuaskan. Perbaikan indikator yang mendesak adalah mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan dan distribusi pendapatan antarkabupaten/kota, meningkatkan kinerja sektor-sektor ekonomi sehingga tercipta pertumbuhan sektor yang lebih merata dan berkeadilan, memperluas peluang kesempatan kerja, dan program perlindungan sosial dari pemerintah masih diperlukan oleh masyarakat D.I. Yogyakarta.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi inklusif, kualitas pertumbuhan, ketimpangan, dan kemiskinan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Kata Sambutan.....	iv
Abstraksi	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan Penulisan	6
1.3. Ruang Lingkup.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pembangunan Nasional	9
2.2. Kesejahteraan	12
2.3. Pertumbuhan Ekonomi	13
2.4. Pertumbuhan Inklusif	14
III. METODE KAJIAN	17
3.1. Metode Penyusunan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	19
3.2. Indikator yang Digunakan	21
3.3. Prosedur Penghitungan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	23
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1. Pertumbuhan Ekonomi DIY Berkualitaskah?	27
4.2. Pertumbuhan Ekonomi DIY Memuaskan	29
4.3. Perbandingan IGI Antarkabupaten/kota se-DIY menurut Dimensi.....	39
4.4. Perbandingan IGI D.I. Yogyakarta dengan Provinsi Lainnya se-Pulau Jawa	44
V. KESIMPULAN	49
5.1. Mengapa Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Perlu Diukur?	49
5.2. Kesimpulan.....	49
5.3. Rekomendasi Hasil Analisis	50
5.4. Keterbatasan dalam Kajian Analisis Ini	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN	55

Daftar Tabel

Tabel 3.1. Dimensi, Sub-Dimensi, dan Indikator Pembentuk IGI	22
Tabel 3.2. Penimbang Sub Dimensi IGI	24
Tabel 3.3. Klasifikasi Skor Capaian IGI	24
Tabel 4.1. Perkembangan PDRB Per Kapita D.I. Yogyakarta, 2011 – 2015.....	28
Tabel 4.2. Sub-dimensi, Indikator, Nilai Skor, dan Capaian Nilai Pembentuk IGI, 2011-2015	30
Tabel 4.3. Indeks <i>Inklusif Growth Index</i> DI.Yogyakarta 2011 - 2015	31
Tabel 4.4. Nilai dan Capaian Indikator Dimensi Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Produktif, dan Infrastruktur Ekonomi, 2011-2015	33
Tabel 4.5. KHL dan UMP/UMK di DIY, 2011-2015	33
Tabel 4.6. Nilai dan Capaian Indikator Dimensi Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Produktif, dan Infrastruktur Ekonomi, 2011-2015	35
Tabel 4.7. Nilai dan Capaian Indikator Dimensi Kesetaraan Gender, 2011-2015 .	36
Tabel 4.8. Nilai dan Capaian Indikator Dimensi Kapabilitas Manusia, 2011-2015	37
Tabel 4.9. Nilai dan Capaian Indikator Dimensi Perlindungan Sosial, 2011-2015	39
Tabel 4.10. Perbandingan IGI menurut Dimensi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Lain se-Pulau Jawa	45

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Peran Pertumbuhan Inklusif dalam Pengentasan Kemiskinan.....	15
Gambar 4.1. Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, dan TPT di DIY, 2011-2015	29
Gambar 4.2. Pertumbuhan Ekonomi, Gini Rasio, dan Indeks Williamson di DIY, 2011-2015	29
Gambar 4.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin D.I. Yogyakarta, 2011-2015	34
Gambar 4.4. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten/ Kota se DIY, 2015.....	40
Gambar 4.5. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota se D.I.Yogyakarta, 2011, 2013, dan 2015	40
Gambar 4.6. Indeks Dimensi Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Produktif, dan Infrastruktur Ekonomi Kabupaten/Kota se D.I. Yogyakarta, 2015	41
Gambar 4.7. Indeks Dimensi Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten/Kota se D.I. Yogyakarta, 2015	42
Gambar 4.8. Indeks Dimensi Kesetaraan Gender Kabupaten/Kota se D.I. Yogyakarta, 2015	42
Gambar 4.9. Indeks Dimensi Kapabilitas Manusia Kabupaten/Kota se D.I. Yogyakarta, 2015	43
Gambar 4.10. Indeks Dimensi Perlindungan Sosial Kabupaten/Kota se D.I. Yogyakarta, 2015	44
Gambar 4.11. Perbandingan Nilai IGI Provinsi se-Pulau Jawa, 2010-2012	45

Daftar Lampiran

Lampiran 1.	Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota dan DIY Tahun 2011-2015	57
Lampiran 2.	Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Tahun 2011-2015: Indeks Dimensi 1 (Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur Ekonomi) dan Dimensi 2 (Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan)	57
Lampiran 3.	Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Tahun 2011-2015: Dimensi 3 (Kesetaraan Gender) dan Dimensi 4 (Kapabilitas Manusia)	57
Lampiran 4.	Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Tahun 2011-2015: Dimensi 5 (Perlindungan Sosial)	58
Lampiran 5.	Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 33 Provinsi dan Indonesia Tahun 2010-2012	59

Bab

1

PENDAHULUAN

“... membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...”

Pembukaan UUD 1945

Halaman ini sengaja dikosongkan

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, seperti yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa lebih dari 70 tahun yang lalu melalui Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum yang berlandaskan keadilan sosial. Kesejahteraan umum mengandung makna secara paripurna yaitu kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, dan kesejahteraan sebagai manusia seutuhnya.

Banyak ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ini tergantung pada sisi yang akan diukur keberhasilan pembangunan tersebut. Pembangunan secara ekonomi biasanya diukur dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didasar pada kenaikan angka Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka pertumbuhan ekonomi ini menjadi *outcome* utama dari pembangunan ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah selalu berupaya mencapai tujuan tersebut dengan tidak meninggalkan tujuan yang akan dicapaidimasadatang. Upaya yang semata-mata ditujukan untuk mewujudkan kondisi daerah dan rakyatnya dalam kondisi lebih baik dibandingkan masa lalu dan sekarang tersebut dilaksanakan dalam proses yang disebut pembangunan. Secara umum, Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan pembangunan manusia. Secara khusus, dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya ditujukan untuk mencapai visi DIY yang telah dituangkan dalam dokumen resmi perencanaan pembangunan yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)



DIY dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka Pemerintah DIY juga bertujuan mewujudkan kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung, sehingga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2012-2017 dirumuskan Visi Pembangunan DIY, yaitu: “Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”.

Sejahtera secara ekonomi mengandung makna bahwa setiap individu dalam masyarakat mampu memenuhi setiap kebutuhan hidupnya secara layak. Sering terjadi *trade off* ketika pembangunan itu dilaksanakan yaitu antara peningkatan secara kuantitas atau peningkatan secara kualitas, meskipun secara idealis ini harus berjalan beriringan. Dalam konsep ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan secara materi. Lebih lanjut, kesejahteraan sosial lebih mengacu pada suatu keadaan dimana seseorang merasa nyaman, tenteram, dan bahagia untuk melakukan kegiatan guna memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Kesejahteraan sosial juga sering dimaknai sebagai akumulatif dari kesejahteraan semua individu di dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tercipta sering dihantui oleh hal-hal yang terkait kemiskinan, pembangunan manusia, ketimpangan, bahkan kerusakan lingkungan.

Untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi setiap warganya, pemerintah telah menyusun rencana dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan pembangunan nasional di berbagai bidang melalui serangkaian strategi pembangunan. Seiring berjalannya waktu, sejarah mencatat upaya nyata enam (6) era kepemimpinan pemerintahan dengan berbagai arah kebijakan yang berbeda namun memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat.

Selama kurun waktu tujuh (7) dasawarsa sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, arah kebijakan pembangunan nasional lebih banyak difokuskan pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan yang tinggi tersebut selain untuk meningkatkan kapasitas produksi perekonomian Indonesia, juga sekaligus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Berangkat dari hal ini, maka strategi kebijakan pembangunan nasional berlandaskan pada asumsi bahwa pertumbuhan yang tinggi akan dengan sendirinya melahirkan pemerataan kesejahteraan bagi rakyat sesuai dengan teori *trickle-down effect*.

Teori tersebut menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh sekelompok masyarakat di kalangan atas dengan sendirinya akan turun menetes ke kelompok masyarakat bawah melalui penciptaan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi lainnya, yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang mendukung terciptanya output sehingga hasil-hasil pertumbuhan ekonomi menjadi merata.

Namun pada kenyataannya, aliran kekayaan yang diharapkan mengalir ke kaum marjinal tidak terjadi secara optimal, karena lebih terkonsentrasi pada golongan kaya.



Kesenjangan antargolongan semakin meningkat. Golongan miskin yang memiliki akses terbatas terhadap modal dan teknologi semakin tertinggal. Dengan demikian, meskipun secara makro kinerja ekonomi Indonesia terlihat impresif, namun prestasi tersebut tidak selalu diikuti dengan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat.

Pada hakekatnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan hanya sebagai sarana dalam meraih kesejahteraan, tetapi lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator pengukur keberhasilan pembangunan nasional. Selain ditentukan oleh faktor pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara juga ditentukan dari kemampuan negara tersebut dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, termasuk juga di dalamnya kemampuan menekan kesenjangan antar golongan. Akhir-akhir ini, beberapa ahli juga memasukkan unsur kesinambungan/keberlanjutan dan wawasan lingkungan dalam menilai keberhasilan suatu pembangunan.

Misi besar bangsa Indonesia di abad ke-21 adalah melanjutkan pembangunan bangsa, menuju Indonesia yang maju dan sejahtera yang ditandai dengan perekonomian yang kuat dan berkeadilan, demokrasi yang stabil dan berkualitas, serta peradaban bangsa yang maju dan unggul. Banyak Strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat antara lain yang dikenal dengan *triple track strategy*, yakni strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-poor*, dan *pro-job* melalui percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Strategi tersebut disempurnakan dengan memasukkan unsur lingkungan dalam kebijakan. Saat ini strategi pemerintah dengan trisakti terutama poin kedua yaitu berdikari dalam bidang ekonomi yang dikembangkan dengan nawa cita yang terdiri dari 9 poin. Beberapa poin yang menjadi fokus pada pembangunan ekonomi ini antara lain meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.

Bertolak pada fakta bahwa Indonesia saat ini berada di pusat baru gravitasi ekonomi dunia, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Hal ini selaras dengan amanah RPJPN untuk RPJMN III (2015-2019), yaitu: memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Ini dimaksudkan juga untuk menjadi landasan dalam mempersiapkan Indonesia sebagai negara yang maju di tahun 2025-2030. Oleh karena itu tema RPJMN 2015-2019 adalah Pembangunan yang Kuat, Inklusif, dan Berkelanjutan (Bappenas, 2014: 101).

Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin bahwa semua orang akan memperoleh manfaat yang sama. Meningkatnya ketimpangan pendapatan dapat menghambat laju penurunan tingkat kemiskinan dan juga berpotensi mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi, karena ketimpangan yang tinggi dapat memiliki implikasi negatif bagi stabilitas politik dan kohesi sosial yang diperlukan untuk menjamin proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengurangan ketimpangan juga merupakan fokus utama kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Meskipun telah ada konsensus tentang bagaimana mendefinisikan dan mengukur inklusivitas suatu pertumbuhan, topik ini masih memunculkan perdebatan akademis dan sejumlah pembahasan terkait kebijakan implementasi pembangunan. Sejalan dengan permasalahan ini, maka dalam penulisan ini, dilakukan penghitungan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif atau yang selanjutnya dikenal sebagai *Inklusif Growth Index* (IGI). Melalui indeks ini, dapat diketahui

kualitas pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Indonesia baik pada level nasional maupun provinsi sebagai suatu proksi evaluasi keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut. Penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan sebuah cara pandang baru dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan yaitu mendorong perekonomian Indonesia menjadi negara maju yang semakin diakui masyarakat dunia melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

1.2. Tujuan Penulisan

Secara umum, penulisan ini menyajikan data dan analisis mengenai indeks IGI selama periode 2010-2012. Secara khusus, sejalan dengan permasalahan di atas, penulisan ini menyajikan:

- i. Menghitung Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.
- ii. Menyajikan hasil pengukuran Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif provinsi dan kabupaten/kota di DIY.
- iii. Menganalisis inklusivitas pertumbuhan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota di DIY.

1.3. Ruang Lingkup

Pengukuran Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif pada kajian ini mengacu pada metode yang dibangun oleh *Asian Development Bank* (ADB). Metode tersebut menggunakan sebanyak 35 indikator yang mempresentasikan 10 sub-dimensi dan 5 dimensi. Namun, mengingat keterbatasan data yang tersedia, maka dilakukan penyesuaian indikator, sehingga menjadi 27 indikator yang terangkum dalam 10 sub-dimensi dan 5 dimensi. Sehingga, jumlah indikator yang digunakan sebanyak 27 buah yang terangkum dalam 10 sub-dimensi dan 5 dimensi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam publikasi ini terdiri atas lima bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- i. Bab 1. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika penulisan.
- ii. Bab 2. Kajian Literatur, berisi penjelasan mengenai konsep pembangunan nasional, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan yang inklusif.
- iii. Bab 3. Metode Kajian, menjelaskan tentang metode penyusunan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, indikator yang digunakan, prosedur penghitungan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, dan penentuan capaian.
- iv. Bab 4. Hasil dan Pembahasan, berisi hasil penghitungan dan analisis capaian IGI hingga level kabupaten/kota dan melihat indikator-indikator pembentuknya.
- v. Bab 5. Penutup, berisi kesimpulan, rekomendasi, dan penjelasan secara ringkas keterbatasan hasil analisis, serta catatan penutup yang menjelaskan ringkas mengapa Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif perlu diukur.

Bab

2

KAJIAN LITERATUR

“Pertumbuhan inklusif memungkinkan setiap orang untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.”

KC Chakrabarty, Reserve Bank of India

Halaman ini sengaja dikosongkan

2

KAJIAN LITERATUR

2.1. Pembangunan Nasional

Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Menurut Todaro (2015), pembangunan merupakan suatu proses peningkatan kualitas hidup manusia, sehingga pembangunan harus mempunyai tujuan meningkatkan kehidupan bangsa dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Suharyanto (2006), pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara berkesinambungan menuju ke arah yang ingin dicapai, yang tentunya merupakan perubahan dari suatu kondisi tertentu menjadi kondisi yang lebih baik. Hal ini merupakan ciri khas pembangunan, meskipun tidak seluruh perubahan dapat dikatakan sebagai pembangunan, terutama perubahan dari kondisi tertentu ke kondisi yang kurang baik atau negatif.

Banyak konsep yang dapat dijadikan landasan ketika membahas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini. Konsep pertama yang selalu menjadi tolok ukur perekonomian secara umum adalah pendapat aliran klasik yang dimotori oleh Adam Smith yaitu pertumbuhan ekonomi bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output (Adam Smith). Pendapat lainnya adalah dari aliran Neo Klasik yaitu Robert Sollow dengan pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output (Robert Solow). Teori pertumbuhan ekonomi modern berpendapat bahwa perekonomian itu sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi, energi, kewirausahaan, bahan baku dan material.

Namun konsep yang sangat umum digunakan adalah pendapat dari pakar yang sering disebut bapak ekonomi pembangunan yaitu Michael P Todaro. Menurut Todaro pembangunan adalah suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah melembaga, dan lembaga-lembaga nasional termasuk dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Menurut PBB, pembangunan masyarakat adalah suatu proses pembangunan yang dilakukan melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya.

Pada hakekatnya, peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tidak

hanya sebagai subyek melainkan juga sebagai obyek pembangunan. Sehingga, segala kebijakan serta implementasi program pembangunan yang telah direncanakan bertujuan untuk memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat. Dari sini, muncul suatu konsep yang dikenal sebagai pembangunan masyarakat. Menurut PBB, pembangunan masyarakat adalah suatu proses pembangunan yang dilakukan melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya.

Pelaksanaan pembangunan suatu bangsa sangat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam ini membutuhkan sistem pengelolaan yang baik, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, sehingga dalam pelaksanaannya harus pula memperhatikan panduan serta kesepakatan internasional seperti Konferensi Lingkungan Hidup PBB di Stockholm (1972) dan juga *Earth Summit* di Rio de Janeiro (1992). Kedua konferensi tersebut menyepakati bahwa setiap pengambilan keputusan atau kebijakan pembangunan, secara prinsip harus memperhatikan dimensi lingkungan hidup dan juga manusia. Dengan demikian, sangatlah penting bagi Indonesia, sebagai bangsa yang memiliki modal sumber daya alam yang melimpah, untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Suatu pembangunan berkelanjutan mengandung dua (2) unsur, yaitu: (i) kebutuhan dan (ii) keterbatasan. Kebutuhan di sini terutama berkaitan dengan kebutuhan dasar bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung, yang harus memperoleh prioritas utama. Sementara itu, keterbatasan berkaitan dengan penguasaan teknologi dan organisasi sosial yang harus memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan di masa mendatang (Sudarmaji, 2007).

Pembangunan berkelanjutan dinyatakan sebagai suatu proses pembangunan yang memiliki prinsip bahwa untuk memenuhi kebutuhan saat ini tidak boleh mengorbankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi di masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, dibutuhkan perpaduan dari tiga (3) pilar pembangunan, yaitu: (i) keberlanjutan dalam aspek sosial, (ii) aspek ekonomi, dan (iii) aspek lingkungan. Tiga pilar utama ini saling berintegrasi dan memperkuat satu sama lain. Untuk itu, ketiga aspek tersebut harus terintegrasi dalam suatu skema perencanaan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yang selain dapat menjaga lingkungan hidup dari ancaman kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi (BAPPENAS, 2010b).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara gamblang menyatakan bahwa Indonesia yang sejahtera merupakan tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara rohani yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita idealnya (Bappenas, 2010a).

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, pemerintah telah menyusun perencanaan pembangunan nasional yang implementasinya dilaksanakan melalui tahapan pembangunan. Pada awal masa pembangunan, bangsa Indonesia mengenal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk masa kurun



waktu 25 tahun, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (RE-PELITA). Pasca reformasi yang diiringi dengan pelaksanaan otonomi daerah, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional telah di-tiadakan.

Dalam rangka penguatan implementasi otonomi daerah serta desentralisasi pemerintahan, khususnya untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk kurun waktu 20 tahun. Penyusunan RPJPN ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dengan paradigma perencanaan yang visioner dan memuat arahan secara garis besar. Dalam pelaksanaannya, RPJPN dijabarkan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk kurun waktu 5 tahun. Masing-masing tahap tersebut mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan, yang merupakan suatu proses berkesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya. Namun demikian, keseluruhan tahapan pembangunan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Sejalan dengan usaha meraih dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka melalui RPJPN 2005-2025 ditegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional untuk 20 tahun ke depan adalah mewujudkan bangsa yang mandiri, maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai implementasi dari usaha tersebut, pada RPJM tahap pertama (2005-2009) ditetapkan skala prioritas utama dan strategi pelaksanaan pembangunan yang diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang meningkat. Kemudian usaha tersebut dilanjutkan dalam RPJM tahap kedua (2010- 2014), dengan skala prioritas utama dan strategi yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian (Bappenas, 2010a).

Agenda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui lima (5) sasaran pokok, yaitu:

1. Menurunkan jumlah penduduk miskin;
2. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah;
3. Meningkatkan kualitas manusia yang tercermin dari angka IPM;
4. Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
5. Membaiknya infrastruktur sarana penunjang pembangunan

Dari kelima sasaran pokok di atas, yang berkaitan dengan pembangunan wilayah adalah sasaran pokok yang kedua, yaitu berkurangnya kesenjangan antar wilayah. Hal ini tercermin dari meningkatnya peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, meningkatnya pembangunan daerah tertinggal, meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing dan produk unggulan, serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah.

Sejalan dengan perkembangan saat ini, realitas global menuntut bangsa Indonesia untuk dapat memaksimalkan setiap potensi serta keunggulan yang dimiliki. Pemerintah tetap melanjutkan proyek-proyek infrastruktur dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia tetapi disesuaikan dengan visi dan misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil pada waktu itu mengatakan kebijakan

mengevaluasi MP3EI dilakukan untuk memetakan proyek-proyek infrastruktur mana saja yang pembangunannya harus diprioritaskan (Bisnis Indonesia, 3 November 2014).

Dokumen MP3EI juga berlandaskan prinsip iterative membuka peluang kepada para pemimpin di masa yang akan datang untuk dapat menyempurnakan muatan kebijakan MP3EI. Hal tersebut menjadikan MP3EI, bukan hanya sebuah instrumen percepatan dan perluasan tetapi sekaligus menjadi instrumen estafet pembangunan yang berkesinambungan dari kabinet ke kabinet berikutnya.

Realisasi MP3EI sebagai pencapaian yang cukup membanggakan pada masa pemerintahannya. Sejak dicanangkan tahun 2011, MP3EI telah merealisasikan lebih dari 382 proyek yang terdiri dari 208 proyek infrastruktur dan 174 sektor riil dengan nilai Rp854 triliun. Salah satu yang menggembirakan adalah mayoritas proyek dilakukan di luar Jawa dengan nilai total Rp544 triliun. Pembangunan bandara yang megah telah terelisasi anatar lain

Bali, Balikpapan, Medan, dan Makassar. Jalan tol atas laut juga sekarang bisa dinikmati di Bali dimana hal ini akan bisa memacu kegiatan ekonomi masyarakat. Pembangunan seharusnya memang tidak hanya berpusat di Pulau Jawa saja, mengingat semua daerah dan provinsi lainnya juga memiliki potensi dan dapat dibangun bersama secara produktif. Beberapa bukti lain patut dibanggakan, misalnya pertumbuhan ekonomi Makassar yang lebih tinggi dari Cina serta angka kemiskinan Banyuwangi yang mampu dipangkas dari 20 menjadi 9 persen dalam waktu tiga tahun. masih banyak tantangan dalam bidang infrastruktur di masa mendatang. Misalnya berhentinya proyek infrastruktur karena alasan politik, birokrasi, atau logistik. Dengan MP3EI kita berharap akan lebih banyak lagi muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

MP3EI yang merupakan manifestasi dari strategi pencapaian rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional di bidang infrastruktur fisik, diharapkan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Harapan itu disampaikan karena program MP3EI umumnya adalah proyek pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang. Berjalan atau tidaknya MP3EI ke depan bukan masalah pemerintahannya siapa, tapi lebih karena faktor kebutuhan. Bila program MP3EI dapat dilanjutkan dengan nama yang tidak serupa, pembangunan infrastruktur diharapkan akan terus berkelanjutan. Semangat percepatan dan perluasan pembangunan dalam program MP3EI ditujukan untuk memperkuat ekonomi domestik melalui konektivitas nasional dan sekaligus mengantisipasi integrasi ekonomi global. Melalui program MP3EI, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru (selain Jawa) diharapkan dapat semakin mendorong kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita pembangunan nasional. Dengan konektivitas nasional, pembangunan daya saing nasional dapat ditingkatkan dan disebar keseluruh wilayah Indonesia. Konektivitas nasional ini sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional melalui jalur distribusi yang lebih efisien dan berdaya saing. Sebagaimana diketahui disparitas pembangunan disebabkan karena lemahnya konektivitas antardaerah (Harera M, 2015: 42-49).

2.2. Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan atau *"well-being"* memiliki definisi yang beragam. Sebagai contoh, kita dapat menilai kesejahteraan seseorang dari kemampuan orang tersebut dalam memenuhi kebutuhan komoditasnya secara umum. Seseorang dikatakan mampu atau memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik jika dia memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya, dalam hal ini kekayaan. Seseorang yang kurang mampu untuk turut andil dan berfungsi dalam masyarakat mungkin memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah (Sen, 1987) atau lebih rentan (*vulnerable*) terhadap krisis dan gejolak ekonomi maupun sosial.

Konsep lain dari kesejahteraan, baik diukur dari dimensi moneter maupun non moneter, adalah ketimpangan. Ketimpangan menitikberatkan pada distribusi dari suatu variabel terukur tertentu, misalnya pendapatan atau pengeluaran, terhadap seluruh penduduk. Hal ini didasar-

kan pada asumsi bahwa posisi relatif dari individu rumah tangga dalam masyarakat merupakan aspek penting dari kesejahteraan mereka. Tingkat ketimpangan secara keseluruhan dalam suatu negara, wilayah atau kelompok penduduk, baik dalam bentuk dimensi moneter maupun non moneter, juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan secara ringkas mengenai tingkat kesejahteraan dalam kelompok tersebut.

Hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan adalah kerentanan, yang didefinisikan sebagai peluang atau resiko seseorang untuk menjadi miskin pada waktu-waktu mendatang. Kerentanan merupakan suatu dimensi kunci dari kesejahteraan, karena kerentanan berakibat pada perilaku individu dalam bentuk investasi, pola produksi, strategi penanggulangan, dan persepsi dari kondisi mereka sendiri.

Menurut *World Bank* (2000), kemiskinan merupakan suatu kondisi yang mengurangi makna kesejahteraan, yang terdiri dari banyak dimensi, antara lain pendapatan rendah dan ketidakmampuan untuk memperoleh barang dasar. Kesejahteraan dapat diukur melalui kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, kesehatan, gizi, pendidikan, aset, perumahan, dan hak-hak tertentu dalam masyarakat seperti kebebasan berbicara.

Salah satu visi Indonesia 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Kesejahteraan yang dimaksud adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, yang dimaksud dengan keadilan adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia (Bappenas, 2010a).

Selama periode 2010-2014, pelaksanaan pembangunan tetap konsisten untuk melanjutkan berbagai program perbaikan kesejahteraan rakyat yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarusutamaan anggaran dan kebijakan. Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Pada periode 2010-2014, usaha peningkatan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui pelaksanaan beberapa sasaran pokok, antara lain :

1. Melanjutkan kebijakan makro ekonomi yang terukur dan berhati-hati;
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan;
3. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
4. Terciptanya kemandirian dalam bidang pangan;
5. Membangun ketahanan energi dengan mencapai diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi;
6. Perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan, penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
7. Melanjutkan proses pembangunan dan ketersediaan infrastruktur yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan.

2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pengamalan sila kelima Pancasila antara lain mencakup upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam sistem

ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar azas kekeluargaan.

Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam hal ini, fokus utamanya terletak pada tiga aspek, yakni: proses, output per kapita, dan jangka panjang. Sebagai suatu rangkaian proses, pertumbuhan ekonomi bukan hanya merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat, namun memberikan potret mengenai perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu. Dalam konteks jangka panjang, pertumbuhan ekonomi berperan sebagai suatu indikator yang menunjukkan kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak komoditas barang dan jasa kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya (Kuznets, 1955).

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dilihat dari peningkatan penyediaan barang secara terus menerus. Teknologi maju merupakan salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat peningkatan kemampuan pemerintah dalam penyediaan aneka macam barang dan jasa kepada penduduknya. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi, sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara optimal. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Todaro (2000) mengusulkan tiga faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:

i. Akumulasi Modal

Akumulasi modal merupakan komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Demikian pula investasi dalam sumberdaya manusia dapat meningkatkan kualitas manusia. Dengan demikian, akan menghasilkan efek yang sama terhadap produksi, bahkan akan lebih besar lagi seiring bertambahnya jumlah manusia. Pendidikan formal dan informal akan dapat ditingkatkan lebih efektif, agar dapat menghasilkan tenaga terdidik yang dapat memperbesar produktivitas.

ii. Pertumbuhan Penduduk dan Tenaga Kerja

Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja merupakan faktor-faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang lebih besar diharapkan dapat menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan penambahan penduduk yang besar akan memperluas pasar domestik.

iii. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi bagi para ahli ekonomi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang penting, karena dapat meningkatkan nilai tambah secara lebih optimal. Hal ini karena teknologi sering dikaitkan dengan penemuan baru yang mendorong kemajuan teknologi khususnya cara memproduksi atau perbaikan proses produksi.

2.4. Pertumbuhan Inklusif

Pertumbuhan yang inklusif dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan yang menjamin kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan masing-masing individu. Dengan demikian, pertumbuhan inklusif akan memberi rakyat miskin sebuah titik awal yang memungkinkan mereka untuk menikmati pertumbuhan ekonomi.

Strategi pencapaian pertumbuhan yang inklusif dapat dicapai melalui beberapa cara, antara lain percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan, menghilangkan ketimpangan dengan menjamin kesetaraan terhadap peluang, peningkatan jumlah tenaga kerja produktif, penguatan kapasitas produksi, dan juga mewujudkan sistem perlindungan sosial (*social safety nets*).

Pertumbuhan inklusif sering dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada penciptaan peluang ekonomi dan dapat diakses oleh semua (Ali dan Zhuang 2007). Menurut Chakrabarty (2009), pendekatan pertumbuhan yang inklusif mengambil perspektif jangka panjang. Oleh karena itu, pertumbuhan inklusif seharusnya bersifat inheren, berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan antara miskin dan kaya. Pertumbuhan inklusif memungkinkan setiap individu untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Menurut Surjit S. Bhalla (2006), pertumbuhan dapat dibagi secara merata dan dirasakan oleh semua penduduk. Pembagian pertumbuhan tersebut dapat sama dengan atau mungkin lebih tinggi bagi penduduk miskin. Pengentasan kemiskinan harus menjadi perhatian utama. Laju pengurangan kemiskinan merupakan salah satu indikasi inklusivitas yang menyertai pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa pengurangan tingkat kemiskinan tergantung pada pertumbuhan garis kemiskinan yang relatif terhadap distribusi konsumsi. Dengan demikian, melalui pertumbuhan yang inklusif, kesenjangan kemiskinan akan berkurang dari waktu ke waktu.

Gambar 2.1. Peran Pertumbuhan Inklusif dalam Pengentasan Kemiskinan



Di sisi lain, proses pertumbuhan inklusif membatasi peran keterlibatan langsung pemerintah. Subsidi dan transfer tunai harus berkurang seiring waktu. Menurut Elena Ianchovichina (2009), pengurangan kemiskinan yang cepat dan berkelanjutan membutuhkan pertumbuhan inklusif yang memungkinkan orang untuk berkontribusi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Kecepatan pertumbuhan, tidak diragukan lagi, diperlukan dalam pengentasan kemiskinan, namun, pertumbuhan ini diharapkan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang, dan menyentuh semua sektor, termasuk peningkatan jumlah tenaga kerja produktif. Dengan demikian, pertumbuhan inklusif menyiratkan hubungan langsung antara indikator pertumbuhan makro dan mikro.

Menurut Terry McKinley (2010), ciri dari pertumbuhan yang inklusif adalah:

- i. Pertumbuhan yang dirasakan oleh semua penduduk.
- ii. Pertumbuhan tersebut sama dengan atau (mungkin) lebih tinggi bagi penduduk miskin.
- iii. Pertumbuhan harus bersifat inklusif di semua sektor.
- iv. Inklusif berarti kecenderungan persamaan kesempatan penduduk semakin berkurang.
- v. Kesenjangan kemiskinan harus berkurang dari waktu ke waktu.
- vi. Peran langsung pemerintah semakin berkurang.

Ada dua kunci dimensi pertumbuhan yang inklusif: (i) mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan serta memperluas peluang ekonomi, dan (ii) memastikan akses yang lebih luas terhadap peluang, sehingga setiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan yang dicapai.

Dimensi pertama yaitu menciptakan dan memperluas peluang ekonomi dibentuk dari komponen pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif, dan infrastruktur. Dimensi kedua yaitu memastikan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan memperoleh manfaat pertumbuhan dibentuk dari komponen kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kesetaraan gender, dan kemampuan sumber daya manusia, serta perlindungan sosial. Dimensi kedua diidentifikasi dengan memperluas kapasitas manusia, seperti investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar sosial. Jaring pengaman sosial juga ditekankan untuk melindungi anggota masyarakat yang paling rentan miskin.

Bab

3

METODE KAJIAN

“Pertumbuhan inklusif memungkinkan setiap orang untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.”

KC Chakrabarty, Reserve Bank of India

Halaman ini sengaja dikosongkan

3 METODE KAJIAN

3.1. Metode Penyusunan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Dalam proses pengukuran indeks komposit pertumbuhan inklusif (*Inclusive Growth Index*, IGI) yang mengutamakan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih merata (berkeadilan), disamping harus memperhatikan pertumbuhan yang lebih cepat, juga perlu diidentifikasi dimensi, sub-dimensi, dan indikator yang paling tepat untuk mewakili indeks tersebut.

McKinley (2010) dan Ali dan Zhuang (2009) dari ADB telah membangun salah satu kerangka konseptual untuk mendiagnosa pembangunan suatu wilayah apakah telah memenuhi kriteria pertumbuhan yang inklusif. Dalam metode yang digunakan untuk mengukur IGI suatu negara tersebut, ADB menggunakan 35 indikator untuk menentukan kriteria pertumbuhan yang inklusif. Indikator-indikator tersebut dirangkum dalam 5 (lima) dimensi pengukuran, yaitu:

1. Dimensi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif, dan infrastruktur ekonomi;
2. Dimensi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan;
3. Dimensi kesetaraan gender;
4. Dimensi kapabilitas manusia;
5. Dimensi perlindungan sosial.

Indikator pembentuk dari masing-masing dimensi pembentuk IGI baik pada level nasional maupun provinsi maupun kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Dimensi Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Produktif, dan Infrastruktur Ekonomi

Dalam rangka menciptakan pertumbuhan yang inklusif, secara fundamental perlu meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita sebagai dasar untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, dan sebagai dasar bagi perkembangan dimensi-dimensi lainnya. Indikator pertumbuhan nilai tambah pada sektor pertanian, industri, dan jasa-jasa juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dari struktur pertumbuhan ekonomi. Indikasi ini tidak akan sepenuhnya terbukti karena pertumbuhan pendapatan per kapita terjadi bukan hanya karena peningkatan produktivitas tetapi juga terbukanya kesempatan kerja baru, misalnya perpindahan pekerja dari pekerjaan dengan gaji rendah ke gaji yang lebih baik.

Tenaga kerja produktif mencakup share pekerja terhadap angkatan kerja, share pekerja di sektor industri pengolahan, share pekerja yang dibayar di sektor non pertanian. Sedangkan untuk mewakili tenaga kerja dari rumah tangga miskin atau tenaga kerja dengan kualitas rendah digunakan indikator share pekerja keluarga/pekerja yang tidak dibayar, dan menggunakan indikator pekerja yang memperoleh penghasilan kurang dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

Inklusivitas juga mencakup akses masyarakat terhadap infrastruktur ekonomi, seperti akses terhadap listrik dan komunikasi. Indikator yang bisa digunakan antara lain proporsi penduduk yang memiliki akses listrik dan pelanggan telepon seluler per 100 orang. Penggunaan indikator-indikator ini memang berbeda bila dibandingkan dengan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur akses masyarakat terhadap infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, ketersediaan air bersih, dan sanitasi lingkungan.

2. Dimensi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Dalam dimensi ini, strategi pencapaian pertumbuhan yang inklusif difokuskan pada upaya mengurangi kemiskinan, terutama penduduk yang sangat miskin. Indikator yang digunakan adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada sub-dimensi ketimpangan, indikator yang digunakan adalah koefisien Gini (*Gini Ratio*). Sebagai komplemennya, juga digunakan indikator *share* pendapatan dari 60% penduduk termiskin/terendah dalam populasi (*income share of the poorest 60% of the population*). Sebagai indikasi terjadinya ketimpangan horizontal maupun vertikal, dimasukkan variabel kontrol seperti ketimpangan kota dan desa.

3. Dimensi Kesenjangan Gender

Semakin besar kesetaraan yang tercipta, diduga semakin besar tingkat inklusivitas dari suatu pertumbuhan. Berikut ini adalah beberapa indikator yang bisa digunakan sebagai tolok ukur terciptanya kesetaraan gender, yaitu:

- Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki, usia 15-24 tahun. Hal ini terkait dengan ketidaksetaraan dalam pendidikan. Angka Melek Huruf (AMH) adalah variabel *outcome*.
- Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki pada tingkat pendidikan menengah.
- Share perempuan yang berstatus pekerja dibayar pada sektor non-pertanian.

4. Dimensi Kapabilitas

Sejauh ini penggunaan dimensi-dimensi di atas dalam pengukuran pertumbuhan yang inklusif dirancang untuk memonitor sisi permintaan (*demand*) dari tenaga kerja. Meskipun demikian, juga perlu didefinisikan suatu konsep *inclusive growth* dari sisi penawaran (*supply side*). Hal ini untuk menjamin apakah penduduk yang bekerja telah memiliki kapabilitas sebagai seorang pekerja yang produktif, sehingga mampu mengambil keuntungan dari kesempatan ekonomi yang tersedia.

Kapabilitas manusia dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungannya. Umumnya, untuk mencerminkan indikator kesehatan pada suatu wilayah, digunakan angka kematian anak di bawah usia 5 tahun sebagai indikator *outcome*. Karena indikator tersebut tidak tersedia, maka sebagai penggantinya digunakan persentase kelahiran dibantu tenaga kesehatan terampil dan Angka Harapan Hidup (AHH). Indikator kesehatan lainnya yang dapat digunakan adalah persentase anak di bawah 5 tahun yang memiliki berat badan kurang (*underweight*). Indikator ini memberi informasi mengenai masalah asupan nutrisi dan kondisi kesehatan. Sayangnya, indikator ini tidak tersedia secara rutin setiap tahunnya, sehingga sebagai penggantinya, digunakan persentase balita yang pernah diberi ASI eksklusif dan persentase balita yang pernah diimunisasi.

Dalam bidang pendidikan, digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan APM SMP. Selain itu juga digunakan indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Di bidang lingkungan yang mempengaruhi kapabilitas manusia, digunakan indikator proporsi penduduk yang memiliki akses ke air bersih, dan proporsi penduduk yang memiliki akses ke sanitasi yang memadai.

5. Dimensi Perlindungan Sosial

Mengingat keterbatasan data yang ada, maka dalam rangka pengukuran indeks pada dimensi perlindungan sosial, hanya digunakan dua indikator yaitu persentase rumah tangga penerima raskin dan rata-rata jumlah raskin per bulan. Penggunaan indikator ini dikarenakan target secara inklusif yang ingin dicapai dari indikator ini adalah untuk melakukan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk. Berbeda dengan target yang ingin dicapai oleh dari model perlindungan sosial lainnya seperti CCT (*conditional cash transfer*), yang lebih terfokus pada penduduk sangat miskin (*chronically poor*). Untuk itu, pertumbuhan yang inklusif dapat tercipta jika pemerintah mampu menciptakan suatu jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam mengatasi terjadinya faktor-faktor eksternal yang dapat memberikan kejutan-kejutan dalam masyarakat, terutama pada masyarakat kelompok *chronically poor*.

Ali (2007) menyatakan, "... pertumbuhan inklusif berfokus pada bagaimana memperluas peluang untuk semua dan menargetkan intervensi perlindungan sosial pada penduduk miskin yang kronis ".

Ali dan Zhuang (2007) juga mengemukakan bahwa "... kunci dari pertumbuhan yang inklusif adalah penciptaan peluang melalui pertumbuhan yang berkelanjutan, membuat peluang yang sama yang dapat diakses oleh semua, dan memberantas kemiskinan yang ekstrim". Dengan demikian, untuk memberantas kemiskinan yang ekstrim, diperlukan suatu penekanan pada beberapa bentuk dasar perlindungan sosial, atau jaring pengaman sosial.

Dalam rangka pengukuran dimensi perlindungan sosial, seandainya datanya tersedia, lebih baik digunakan indikator indeks perlindungan sosial (*social protection index*) yang mencakup: rasio pengeluaran untuk program perlindungan sosial terhadap PDRB; rasio penerima perlindungan sosial terhadap kelompok sasaran utama; jumlah rumah tangga miskin penerima program perlindungan sosial terhadap total rumah tangga miskin; rasio antara rata-rata penerimaan penduduk miskin penerima program perlindungan sosial perkapita dengan garis kemiskinan (*poverty line*).

Selanjutnya kelima dimensi tersebut diberi pembobot secara proporsional sehingga dapat mengukur sebuah indeks komposit yang disebut sebagai *Inklusif Growth Index*. Selanjutnya, digunakan suatu besaran sebagai *benchmark* untuk menunjukkan seberapa memuaskan inklusivitas yang dicapai dari suatu pertumbuhan ekonomi.

3.2. Indikator yang Digunakan

Indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dalam kajian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari beragam sumber, seperti publikasi BPS (Statistik Indonesia, Data dan Informasi Kemiskinan), serta data hasil pengolahan Susenas dan Sakernas tahun 2010, hingga 2015.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dimensi-dimensi yang digunakan dalam pengukuran inklusivitas pertumbuhan di Indonesia merujuk pada metode yang digunakan oleh ADB dengan mengadopsi beberapa indikator yang tersedia datanya. Beberapa indikator dikelompokkan dalam suatu sub-dimensi, dan lebih lanjut, beberapa sub-dimensi dikelompokkan dalam suatu dimensi.

Dengan demikian, diharapkan suatu kelompok indikator dapat mewakili atau menggambarkan inklusivitas suatu sub-dimensi. Selanjutnya, suatu kelompok sub-dimensi diharapkan dapat menggambarkan inklusivitas suatu dimensi. Pada akhirnya, komposit dari seluruh dimensi diharapkan dapat menggambarkan tingkat inklusivitas pertumbuhan ekonomi secara nasional atau provinsi atau kabupaten/kota.

Ragam indikator beserta sub-dimensi dan dimensi pembentuk IGI yang digunakan dalam kajian ini sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Dimensi, Sub-Dimensi, dan Indikator Pembentuk IGI

Dimensi [I_i]	Sub Dimensi [I_{ij}]	Indikator [I_{ijk}]
1. Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Produktif, dan Infrastruktur Ekonomi [I_1]	1. Pertumbuhan Ekonomi [I_{11}]	1. Pertumbuhan PDRB per Kapita [I_{111}]
		2. Share sektor industri, jasa, dan pertanian terhadap total PDRB [I_{112}]
	2. Tenaga Kerja Produktif [I_{12}]	1. Persentase Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja [I_{121}]
		2. Share Tenaga Kerja Industri Pengolahan [I_{122}]
		3. Share Tenaga Kerja Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Tidak Dibayar [I_{123}]
		4. Tenaga Kerja Berpenghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi [I_{124}]
	3. Infrastruktur Ekonomi [I_{13}]	1. Proporsi Penduduk yang Memiliki Akses Listrik [I_{131}]
		2. Pelanggan Seluler per 100 Orang [I_{132}]
2. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan [I_2]	1. Kemiskinan [I_{21}]	1. Persentase Penduduk Miskin [I_{211}]
	2. Ketimpangan Pendapatan [I_{22}]	1. Koefisien Gini [I_{221}]
		2. Share Pendapatan 60% Terendah dari Populasi [I_{222}]
		3. Ketimpangan Desa dan Kota [I_{223}]
3. Kesenjangan Gender [I_3]	1. Kesenjangan Gender [I_{31}]	1. Rasio Perempuan dengan Laki-Laki yang Melek Huruf Usia 15-24 Tahun [I_{311}]
		2. Rasio Anak Perempuan yang Berpendidikan Menengah [I_{312}]
		3. Share Perempuan dalam Pekerjaan Dibayar non-Pertanian [I_{314}]
4. Kapabilitas Manusia [I_4]	1. Kesehatan dan Gizi [I_{41}]	1. Persentase Kelahiran Dibantu Tenaga Kesehatan Terampil [I_{411}]
		2. Persentase Balita Yang Pernah Diimunisasi [I_{412}]
		3. Persentase Balita Yang Pernah Diberi ASI [I_{413}]
		4. Angka Harapan Hidup [I_{414}]
	2. Pendidikan [I_{42}]	1. Angka Melek Huruf (AMH) [I_{421}]
		2. Rata-rata Lama Sekolah [I_{422}]
		3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD [I_{423}]
		4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP [I_{424}]
	3. Air dan Sanitasi [I_{43}]	1. Proporsi Penduduk yang Memiliki Akses Air Bersih [I_{431}]
		2. Proporsi Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi [I_{432}]
5. Perlindungan Sosial [I_5]	1. Perlindungan Sosial [I_{51}]	1. Persentase Rumah Tangga Penerima Raskin [I_{511}]
		2. Rata-rata Jumlah Raskin yang Diterima [I_{512}]

3.3. Prosedur Penghitungan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

i. Normalisasi Data Awal

Mengingat satuan dari variabel atau indikator yang digunakan dalam pengukuran IGI berbeda-beda, maka dilakukan normalisasi data ke dalam skala antara 0 dan 10. Selain itu, mengingat adanya perbedaan sifat indikator terhadap pertumbuhan ekonomi (positif atau negatif), maka dalam rumus normalisasi data awal, dilakukan *treatment-treatment* yang berbeda. Untuk jelasnya, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk variabel yang mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi:

$$Z_{ij} = 10 \left(\frac{X_{ijk} - X_{ij(min)}}{X_{ijk(max)} - X_{ij(min)}} \right)$$

- b. Untuk variabel yang mempunyai hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi:

$$Z_{ij} = -10 \left(\frac{X_{ijk} - X_{ij(min)}}{X_{ijk(max)} - X_{ij(min)}} \right) + 10$$

keterangan,

X_{ijk} : Nilai sub-dimensi ke-i, indikator ke-j, dan observasi ke-k.

$X_{ij(MIN)}$: Nilai minimum target sub-dimensi ke-i, indikator ke-j.

$X_{ij(MAX)}$: Nilai maksimum target sub-dimensi ke-i, indikator ke-j.

ii. Penghitungan Indeks Sub-Dimensi

Setelah data awal dinormalisasi, berikutnya dilakukan penghitungan indeks sub-dimensi dengan cara:

$$I_{ij} = \sum_{k=1}^n w_{ij} Z_{ij}$$

w_{ij} : penimbang dari McKinley, 2010 dan Ali dan Zhuang dari ADB.

iii. Penghitungan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IGI)

Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dilakukan dengan menjumlahkan seluruh indeks sub komponen atau dengan rumus :

$$IGI = \sum_{i=1}^n I_i$$

Mengingat dalam kajian ini inklusivitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak hanya dianalisis dalam level nasional maupun provinsi, tapi juga keterbandingan dengan negara-negara lain, maka penimbang yang digunakan di sini sama dengan penimbang yang digunakan oleh ADB, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Penimbang Sub Dimensi IGI

Sub Dimensi	Bobot (Wi)	Sub Dimensi	Bobot (Wi)
Pertumbuhan Ekonomi (I_1)	0.25	Ketidaksetaraan Gender (I_6)	0.05
Tenaga Kerja Produktif (I_2)	0.15	Kesehatan dan Gizi (I_7)	0.05
Infrastruktur (I_3)	0.10	Pendidikan (I_8)	0.05
Kemiskinan (I_4)	0.10	Air dan Sanitasi (I_9)	0.05
Ketimpangan Pendapatan (I_5)	0.10	Perlindungan Sosial (I_{10})	0.10

Sumber: Analisis Pertumbuhan Inklusif 2013, BPS RI.

3.4. Penentuan Capaian

Untuk masing-masing indikator akan diberi skor, berdasarkan performa capaiannya. Pembentukan skor dibuat menjadi 3 capaian yaitu tidak memuaskan (<4), memuaskan (4-7), dan sangat memuaskan (8-10).

Tabel 3.3. Klasifikasi Skor Capaian IGI

	Skor		
	<4	4-7	8-10
Capaian	Kurang Memuaskan	Memuaskan	Sangat Memuaskan

Sumber: Analisis Pertumbuhan Inklusif 2013, BPS RI.

Bab

4

HASIL DAN PEMBAHASAN

"Kunci dari pertumbuhan yang inklusif adalah penciptaan peluang melalui pertumbuhan yang berkelanjutan yang dapat diakses oleh semua"

Ali & Zhuang

Halaman ini sengaja dikosongkan

4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan yang inklusif (*inklusif growth*) telah menjadi suatu kebijakan pembangunan yang penting, khususnya pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini karena *inklusif growth* bertujuan untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi yang dicapai dengan perkembangan sosial-ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah, sehingga seluruh penduduk pada wilayah tersebut dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional atau suatu wilayah yang tinggi biasanya diiringi dengan peningkatan pendapatan nasional atau wilayah tersebut. Distribusi pendapatan nasional atau wilayah akan menentukan bagaimana pendapatan nasional atau suatu wilayah yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan nasional atau suatu wilayah yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem ini hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja. Kondisi ini yang disebut sebagai ketimpangan (*inequality*).

4.1. Pertumbuhan Ekonomi DIY Berkualitaskah?

Perkembangan perekonomian DIY dalam beberapa tahun terakhir pada kondisi tren yang masih lesu. Hal ini merupakan dampak perekonomian nasional yang sedang menurun akibat faktor eksternal krisis global yang disebabkan pengaruh besar dari krisis Cina Tiongkok. Berdasarkan kajian Analisis PDRB BPS-Bappeda DIY (2016), Meskipun demikian dalam periode 2011-2015 secara absolut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY terus meningkat dari tahun ke tahun (BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016).

Gambaran perekonomian DIY dapat dilihat dari sisi PDRB DIY baik berdasarkan harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2011 PDRB DIY sebesar Rp71,37 triliun (atas dasar harga berlaku), meningkat menjadi Rp101,4 triliun pada tahun 2015. Pada sisi harga konstan, PDRB DIY juga naik, dari Rp68,05 triliun menjadi Rp83,46 triliun. Peningkatan tersebut juga diikuti oleh peningkatan PDRB per kapita. Berdasar harga berlaku, PDRB per kapita DIY meningkat dari Rp20,33 juta per tahun menjadi Rp27,56 juta per tahun, sedangkan berdasar pada harga konstan, PDRB per kapita naik dari Rp19,39 juta per tahun menjadi Rp22,68 juta per tahun. Selama periode tersebut, ekonomi DIY tumbuh rata-rata 5,24 per-sen per tahun. Sementara itu PDRB per kapita dalam periode tersebut tumbuh pada kisaran 3,74 persen sampai dengan 4,11 persen.

Berdasar pada kondisi tersebut, perekonomian DIY perlu didorong untuk tumbuh lebih pesat lagi setidaknya hingga dapat melewati kondisi rata-rata perekonomian nasional. Bila pada tahun-tahun sebelumnya DIY berada di bawah rata-rata nasional, di tahun 2014-2015 pertumbuhan ekonomi DIY meskipun melambat yaitu hanya tumbuh 5,16 persen dan 4,94 persen, namun masih lebih tinggi

dibanding rata-rata nasional yang hanya tumbuh 5,02 persen dan 4,79 persen.

Potensi ekonomi daerah dari segi potensi kategorial dapat juga dilihat dari pangsa distribusi yang dikaitkan dengan pertumbuhannya. Kategori jasa pendidikan mempunyai potensi paling kuat karena di samping mempunyai kontribusi yang cukup besar tampak bahwa pertumbuhannya juga termasuk tinggi. Kategori yang mempunyai level potensi yang hampir sama adalah perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor, kemudian diikuti kategori real estat.

Tabel 4.1. Perkembangan PDRB per Kapita D.I. Yogyakarta, 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh. berlaku					
(juta rupiah)	71.369.958	77.247.861	84.924.543	92.829.330	101.396.117
PDRB adh. konstan 2010 (juta rupiah)	68.049.874	71.702.449	75.627.450	79.532.277	83.461.574
Penduduk pertengahan tahun (orang)*	3.509.997	3.552.462	3.594.854	3.637.116	3.679.176
PDRB per kapita adh. Berlaku:(rupiah)	20.333.339	21.744.880	23.623.920	25.522.785	27.559.464
PDRB per kapita adh. konstan 2010 (rupiah)	19.387.445	20.183.875	21.037.697	21.866.852	22.684.855
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. berlaku (%)	9,01	6,94	8,64	8,04	7,98
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. konstan (%)	3,94	4,11	4,23	3,94	3,74

Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha 2011-2015, BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.

Kondisi ekonomi akan selalu mempunyai hubungan timbal balik dengan kondisi sosial. Selama periode 2011-2015, angka beban tanggungan (*dependency ratio* - DR) mempunyai tren menurun meskipun tidak terlalu nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa beban tanggungan kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) telah semakin berkurang.

Pada sisi ketenagakerjaan, pada periode tersebut memang jumlah pengangguran tidak mengalami penurunan secara nyata, namun angka pengangguran di DIY sudah relatif rendah. Pada tahun 2011 angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,97 persen, di tahun 2013 menjadi 3,24 persen meskipun naik lagi menjadi 4,07 persen pada tahun 2015. Dilihat tingkat pendidikannya, persentase pengangguran terbesar dari kelompok usia dengan pendidikan menengah ke atas. Angka TPT tahun 2015 yang 4,07 persen tersebut, pengangguran dengan tingkat pendidikan menengah ke atas sekitar 3,02 persen. Artinya, pengangguran di DIY lebih didominasi oleh mereka yang mempunyai tingkat pendidikan menengah ke atas.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,24 persen per tahun ternyata belum banyak mendorong tumbuhnya kesempatan kerja. Rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja masih tumbuh di bawah 1 persen per tahun. Namun demikian, oleh karena penyerapan tenaga kerja didominasi pada kategori usaha yang padat modal, yaitu pertanian, perdagangan, dan jasa-jasa maka untuk menelusuri kualitas pertumbuhan lebih mendalam perlu dilihat pertumbuhan dan kinerja masing-masing lapangan usaha.

Pertumbuhan ekonomi DIY dilihat dampaknya pada pengurangan kemiskinan telah memberikan hasil yang cukup nyata. Pada tahun 2011 persentase penduduk miskin DIY masih 16,08 persen. Selama empat tahun kemudian penduduk miskin telah berkurang menjadi 13,16 persen.

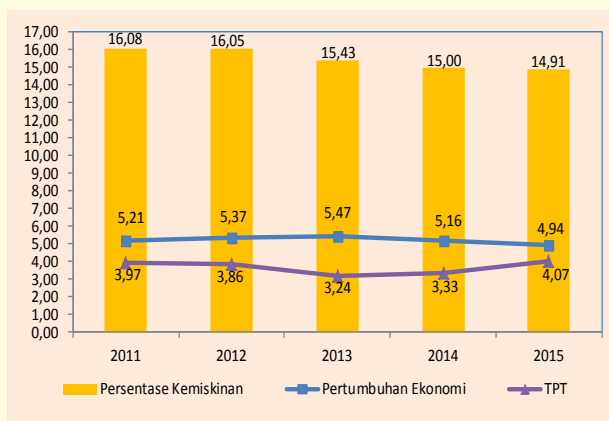
Meskipun bila dibandingkan secara nasional angka kemiskinan DIY masih relatif tinggi, namun pengurangan angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir yang sebesar 2,92 poin tersebut merupakan prestasi nyata yang membanggakan dari kebijakan dan program pengentasan kemiskinan.

PDRB per kapita per tahun yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, ternyata belum diimbangi oleh pemerataan distribusi pendapatan penduduk. Hal ini tercermin dari angka Rasio Gini DIY yang masih pada kisaran 0,42 sampai dengan 0,43 selama periode tersebut. Demikian pula persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah terlihat cenderung menurun. Pada tahun 2011 golongan penduduk tersebut masih menikmati porsi “kue ekonomi” DIY sekitar 16,46 persen, namun pada tahun-tahun berikutnya bagian “kue ekonomi” untuk golongan ini porsinya turun menjadi 15,67 persen di tahun 2015.

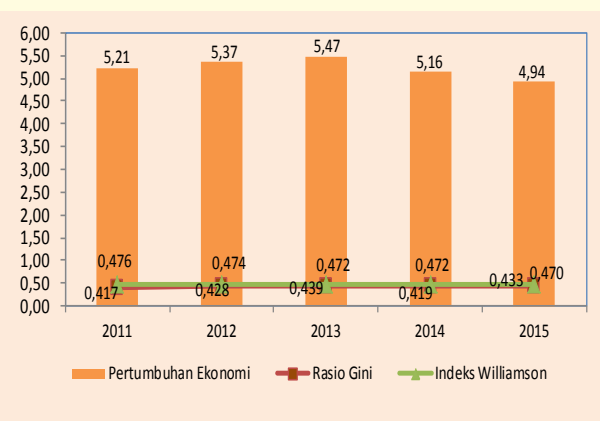
Sementara itu indikator ketimpangan regional yang dilihat dengan menggunakan Indeks Williamson, angka ketimpangannya pada skala moderat namun di tepi atas. Pada tahun 2011, Indeks Williamson sebesar 0,48, sedikit turun menjadi 0,47 di tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa kemajuan pembangunan antarkabupaten/kota di DIY masih terjadi kesenjangan.

Dengan demikian ciri pertumbuhan ekonomi DIY ternyata mampu berperan menekan penurunan kemiskinan dan angka pengangguran. Bahkan ketika pertumbuhan melambat, secara bersamaan angka pengangguran ikut terdorong meningkat. Namun lain halnya dengan kemiskinan karena meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan persentase penduduk miskin masih mampu konsisten semakin menurun. Hal ini dimungkinkan terjadi bahwa dampak melambatnya perekonomian tidak langsung dirasakan pada periode yang bersamaan tetapi jeda pada beberapa periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi juga belum banyak berperan mendorong peluang kesempatan kerja secara merata di sektor-sektor ekonomi. Sementara itu terhadap tren pengurangan angka ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan oleh angka Rasio Gini dan juga angka ketimpangan antarwilayah dengan menggunakan Indeks Williamson, naik turunnya capaian pertumbuhan ekonomi tidak banyak berpengaruh terhadap perubahan pengurangan angka ketimpangan pendapatan dan ketimpangan antarwilayah. Dengan kondisi demikian maka pertumbuhan ekonomi DIY masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Gambar 4.1. Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, dan TPT di DIY, 2011-2015



Gambar 4.2. Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini, dan Indeks Williamson di DIY, 2011-2015



4.2. Pertumbuhan Ekonomi DIY Memuaskan

Dalam perspektif pengukuran kualitas pertumbuhan ekonomi, selain dengan melihat capaian indikator ekonomi sosial pada bahasan subbab 4.1 tersebut di atas, ukuran kualitas pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari *Inklusif Growth Index* (IGI). Nilai indeks IGI DIY disajikan selama lima tahun (2011-2015) pada Tabel 4.3, mencakup besaran penimbang yang digunakan, skor,

dan indeks IGI pada setiap sub-dimensi. Penyajian 5 tahun ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar perkembangan kualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai setiap tahunnya, sekaligus untuk mengevaluasi kinerja dari masing-masing dimensi. Langkah evaluasi ini penting untuk mengetahui dimensi manakah yang mengalami peningkatan antartahun atau sebaliknya. Pada setiap dimensi, selanjutnya dapat dievaluasi menurut sub-dimensi dan indikator-indikator pembentuknya, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota.

Secara umum, kualitas pertumbuhan ekonomi DIY telah memuaskan selama lima tahun periode kajian, dan tingkat kepuasan tersebut cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 tingkat kepuasan sebesar 6,20, naik terus menjadi 6,45 pada tahun 2014 meskipun di tahun 2015 sedikit lebih rendah menjadi 6,35. Makna indeks tersebut merujuk pada pendapat Ali dan Zhuong (2007) tentang konsepsi *inclusive growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada penciptaan peluang ekonomi dan memastikan diakses oleh semua. Peluang ekonomi terwujud dengan meningkatnya pertumbuhan sektor *tradeable* (pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan). Sementara akses masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi terindikasi bahwa tidak ada jurang kesenjangan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di masyarakat.

Peningkatan kepuasan tahun 2013 relatif tinggi dibanding tahun lainnya, yakni sebesar 1,34 persen dibanding tahun 2012. Hal ini didukung oleh peningkatan kepuasan 7 (tujuh) sub-dimensi, sedangkan sub-dimensi yang perkembangannya mengalami penurunan adalah kesetaraan gender, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sub-dimensi kemiskinan dan ketimpangan pada tahun 2013 juga tumbuh relatif tinggi, yaitu masing-masing 9,32 persen dan 8,47 persen. Sub-dimensi kesetaraan gender, pendidikan dan perlindungan sosial mengalami penurunan kepuasan masing-masing sebesar 0,35 persen, 0,7 persen dan 4,14 persen.

Sementara itu, di tahun 2015 IGI DIY mengalami kontraksi sebesar 1,57 persen. Hal ini lebih diakibatkan oleh pertumbuhan negatif yang terjadi pada 6 (enam) sub-dimensi, yaitu pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif, ketimpangan pendapatan, kesetaraan gender, kesehatan, dan perlindungan sosial. Oleh karena penimbang sub-dimensi pertumbuhan ekonomi paling be-

Tabel 4.2. Sub-dimensi, Indikator, Nilai Skor, dan Capaian Nilai Pembentuk IGI, 2011-2015

Sub-dimensi	Indikator	Nilai Skor					Capaian Nilai				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB per kapita	3,94	4,11	4,23	3,94	3,74	3,94	4,11	4,23	3,94	3,74
	Share Sektor Industri, Jasa dan Pertanian	7,68	7,80	7,76	7,81	7,78	46,21	45,42	45,66	45,36	45,54
Tenaga Kerja Produktif	Persentase Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja	8,92	9,04	9,19	9,17	8,98	95,68	96,14	96,76	96,67	95,93
	Share Tenaga Kerja Industri	4,89	4,99	4,45	4,66	4,87	14,68	14,97	13,36	13,97	14,61
	Share Tenaga Kerja Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Tidak Dibayar	4,45	4,22	4,20	4,27	4,51	27,75	28,88	29,02	28,67	27,46
	Tenaga Kerja Berpenghasilan di Bawah UMP	4,23	3,32	3,90	4,02	3,03	46,13	53,47	48,82	47,85	55,74
Infrastruktur ekonomi	Proporsi Rumah Tangga Memiliki Akses Listrik	9,53	9,81	9,65	9,66	9,82	99,53	99,81	99,65	99,66	99,82
	Persentase Rumah Tangga Memiliki Telepon Seluler/Pelanggan Seluler per 100 Orang	3,63	4,12	4,33	4,46	5,60	49,07	52,99	54,60	55,71	64,79
Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	3,54	3,65	3,99	4,18	4,74	16,14	15,88	15,03	14,55	13,16
Ketimpangan Pendapatan	Koefisien Gini	6,00	5,70	5,61	5,81	5,67	0,40	0,43	0,44	0,42	0,43
	Share Pendapatan 60 % Terendah dari Populasi	4,23	3,74	5,11	5,22	5,05	34,63	37,59	29,32	28,68	29,71
	Ketimpangan Desa Kota	7,63	7,88	8,06	8,40	7,66	0,24	0,21	0,19	0,16	0,23

Sub-dimensi	Indikator	Nilai Skor					Capaian Nilai				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Kesetaraan Gender	Rasio Perempuan dengan Laki-laki yang Melek Huruf (Usia 15-24 Th)	10,00	9,63	9,16	9,43	9,69	1,08	0,96	0,92	0,94	0,97
	Rasio Anak Perempuan Berpendidikan Menengah	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1,42	1,07	1,37	1,00	1,46
	Share Perempuan dalam Pekerjaan Dibayar non Pertanian	6,86	7,38	7,76	7,57	6,95	34,29	36,89	38,79	37,83	34,76
Kesehatan	Persentase Kelahiran Dibantu Tenaga Kesehatan Terampil	9,66	9,40	9,88	9,92	9,74	99,32	98,79	99,75	99,84	99,49
	Persentase Balita Yang Pernah Diimunisasi	9,68	9,65	9,63	9,42	7,94	99,37	99,30	99,25	98,84	95,88
	Rata-rata Balita Yang Pernah diberi ASI Eksklusif	7,46	7,44	7,82	8,27	7,22	4,48	4,46	4,69	4,96	4,33
	Angka Harapan Hidup	8,21	8,23	8,24	8,25	8,28	74,26	74,36	74,45	74,50	74,68
Pendidikan	Angka Melek Huruf	9,15	9,20	9,29	9,69	9,49	91,49	92,02	92,86	96,87	94,95
	Rata-rata Lama Sekolah	5,69	5,75	5,82	5,89	6,00	8,53	8,63	8,72	8,84	9,00
	APM SD	9,46	9,77	9,96	9,94	9,89	99,46	99,77	99,96	99,94	99,89
	APM SLTP	8,80	9,16	8,31	9,74	9,84	97,59	98,32	96,63	99,48	99,68
Sanitasi	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Air Bersih	8,91	8,94	9,08	9,00	9,22	89,12	89,37	90,78	89,98	92,23
	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi	8,38	8,45	8,37	8,30	8,70	83,82	84,46	83,68	83,02	86,99
Perlindungan Sosial	Persentase RT penerima raskin	4,09	4,54	4,69	4,61	4,00	40,94	45,39	46,91	46,12	39,96
	Rata-rata Jumlah Raskin per bulan	7,19	8,03	7,35	7,58	6,00	7,19	8,03	7,35	7,58	6,00

Sumber: Hasil Olahan

sar, maka perubahan yang terjadi pada sub-dimensi ini juga berpengaruh besar pada perubahan indeks IGI. Selain itu sub-dimensi pendidikan mengalami pertumbuhan yang stagnan (kurang dari satu persen), yaitu sebesar 0,43 persen. Pertumbuhan yang relatif tinggi pada sub-dimensi infrastruktur ekonomi dan pengurangan kemiskinan tidak mampu menahan laju turunnya kualitas kepuasan pertumbuhan ekonomi tahun 2015. Penurunan indeks kepuasan paling parah terjadi pada sub-dimensi perlindungan sosial yaitu indeksnya mengalami kontraksi sebesar 18 persen dibanding tahun 2014. Hal ini ternyata disebabkan oleh menurunnya alokasi jumlah rumah tangga penerima raskin dari 46,12 persen di tahun 2014 menjadi hanya 39,96 persen di tahun 2015, dan ini juga berdampak pada rata-rata jumlah raskin yang diterima per bulan oleh rumah tangga juga menurun.

Tabel 4.3. Indeks IGI Provinsi DIY, 2011-2015

Sub-dimensi	Penimbang	Skor					IGI					Pertumbuhan IGI (%)	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2014	2015
Pertumbuhan Ekonomi	0,25	5,81	5,95	6,00	5,87	5,76	1,45	1,49	1,50	1,47	1,44	-2,05	-1,93
Tenaga Kerja Produktif	0,15	5,62	5,39	5,43	5,53	5,35	0,84	0,81	0,82	0,83	0,80	1,72	-3,24
Infrastruktur ekonomi	0,10	6,58	6,96	6,99	7,06	7,71	0,66	0,70	0,70	0,71	0,77	1,05	9,18
Kemiskinan	0,10	3,54	3,65	3,99	4,18	4,74	0,35	0,36	0,40	0,42	0,47	4,81	13,30
Ketimpangan Pendapatan	0,10	5,95	5,77	6,26	6,48	6,13	0,60	0,58	0,63	0,65	0,61	3,45	-5,41
Kesetaraan Gender	0,05	8,95	9,00	8,97	9,00	8,88	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,29	-1,30
Kesehatan dan Gizi	0,05	8,75	8,68	8,89	8,96	8,30	0,44	0,43	0,44	0,45	0,41	0,81	-7,45
Pendidikan	0,05	8,37	8,51	8,45	8,75	8,79	0,42	0,43	0,42	0,44	0,44	3,57	0,43
Air dan Sanitasi	0,05	8,65	8,69	8,72	8,65	8,96	0,43	0,43	0,44	0,43	0,45	-0,83	3,59
Perlindungan Sosial	0,10	5,64	6,28	6,02	6,09	5,00	0,56	0,63	0,60	0,61	0,50	1,19	-17,98
Total IGI	1,00						6,20	6,31	6,39	6,45	6,35	0,86	-1,57

Keterangan: 0-3,99 tidak memuaskan; 4,00-7,99 memuaskan; 8,00-10 sangat memuaskan

Sumber: Hasil Olahan

Meskipun IGI DIY tahun 2015 mengalami kontraksi, namun beberapa sub-dimensi mengalami pertumbuhan mengesankan. Pertumbuhan terbesar terjadi pada sub-dimensi kemiskinan, yaitu 13,3 persen. Sub-dimensi infrastruktur ekonomi juga tumbuh di atas 9 persen. Sub-dimensi air dan sanitasi air juga tumbuh positif meskipun hanya 3,6 persen.

Untuk mengetahui penyebab tinggi atau rendahnya capaian kepuasan pada suatu dimensi, perlu dikaji lebih mendalam capaian pada masing-masing sub-dimensi beserta indikator-indikator di dalamnya. Kajian di sini dilakukan pada setiap dimensi dengan berfokus pada perkembangan capaian masing-masing sub-dimensi dan indikator selama periode 2011 sampai dengan 2015, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3.

a. Dimensi Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Produktif, dan Infrastruktur Ekonomi

Dimensi ini mencakup tiga sub-dimensi, yaitu pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif, dan infrastruktur ekonomi. Dalam penghitungan indeks IGI ini, sub-dimensi pertumbuhan ekonomi terdiri dari dua indikator, yaitu pertumbuhan produk domestik bruto per kapita, dan *share* sektor industri, jasa, dan pertanian terhadap total PDRB.

Pada dua tahun terakhir, kualitas sub-dimensi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan (dibanding tahun sebelumnya). Hal ini disebabkan oleh penurunan skor pada indikator pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita dari 4,23 menjadi 3,94 (tahun 2014) dan dari 3,94 menjadi 3,74 (tahun 2015). Demikian pula skor indikator *share* sektor pertanian, jasa, dan industri pengolahan pada tahun 2015 juga sedikit menurun, namun letak perbedaannya adalah indikator ini pada tahun 2014 skornya naik. Penurunan skor indikator tersebut disebabkan oleh penurunan kontribusi ketiga sektor terhadap PDRB, dari 45,66 persen menjadi 45,54 persen pada tahun 2015. Tampaknya, penurunan kontribusi tersebut juga terjadi pada tahun 2012 dibanding tahun 2011, yakni dari 46,21 persen menjadi 45,42 persen. Dengan demikian, telah terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian, industri, dan jasa terhadap PDRB selama lima tahun periode kajian. Penurunan ini mengindikasikan adanya fenomena de-industrialisasi pada ketiga sektor tersebut, terutama sektor pertanian.

Kontribusi sub-dimensi tenaga kerja produktif terhadap peningkatan capaian dimensi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif, dan infrastruktur ekonomi pada tahun 2011-2013 lebih didukung oleh peningkatan pencapaian indikator persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja, meskipun dalam perkembangan periode berikutnya, 2013-2015, mengalami penurunan. Sementara tiga indikator yang lain, yaitu *share* tenaga kerja industri pengolahan, *share* tenaga kerja berusaha sendiri dan pekerja keluarga tidak dibayar, dan persentase tenaga kerja berpenghasilan di bawah UMP nilai skornya cenderung menurun.

Peningkatan skor pada dua indikator yaitu *share* tenaga kerja industri dan *share* tenaga kerja berusaha sendiri dan pekerja keluarga tidak dibayar pada periode 2013-2015 didukung oleh peningkatan *share* tenaga kerja industri pengolahan, yaitu naik dari 13,36 persen pada 2013 menjadi 14,61 persen pada 2015. Peningkatan ini menunjukkan peningkatan kesempatan kerja di kategori industri pengolahan.

Peningkatan *share* tenaga kerja pada industri pengolahan selama 2013-2015 (13,36 persen, 13,97 persen, dan 14,61 persen) mengindikasikan bahwa pertumbuhan yang diraih sektor ini juga diiringi kemampuan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan informasi pada Gambar 4.7, secara umum, pada tahun 2012 setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen, tenaga kerja yang terserap sebanyak 0,17 persen

Peningkatan skor pada indikator ketiga (*share* tenaga kerja berusaha sendiri dan pekerja keluarga tidak dibayar) diindikasikan dengan tren penurunan jumlah pekerja yang berusaha sendiri atau bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar pada periode 2013-2015, sedangkan

pada periode 2011-2013 persentasenya meningkat. Pada 2013, terdapat 29,02 persen pekerja yang masuk dalam golongan tersebut. Angka ini menurun menjadi 28,67 persen pada 2014, dan kembali turun menjadi 27,46 persen pada 2015. Penurunan persentase tersebut diduga dikarenakan para pekerja tersebut lebih memilih bekerja sebagai pekerja yang dibayar, daripada berusaha sendiri atau sebagai pekerja keluarga.

Indikator terakhir pada sub-dimensi tenaga kerja produktif adalah tenaga kerja yang berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP) menunjukkan kinerja yang berfluktuatif selama periode 2011-2015. Pada tahun 2012, kinerja indikator tersebut menurun dari 8,47 menjadi 6,63 diakibatkan oleh peningkatan jumlah pekerja yang digaji di bawah UMP (melonjak dari 46,13 persen menjadi 53,47 persen). Kinerja indikator ini membaik di tahun 2013 dan 2014, persentase tersebut menurun masing-masing menjadi 48,82 persen dan 47,85 persen, yang mengakibatkan skor indikator ini meningkat menjadi 7,80 dan 8,04. Namun sayangnya tren peningkatan skor indikator ini kembali turun di tahun 2015 yaitu menjadi 6,07 yang diakibatkan memburuknya kondisi pekerja yang digaji di bawah UMP yaitu meningkat menjadi 55,74 persen.

Tabel 4.4. Nilai dan Capaian Indikator Dimensi Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Produktif, dan Infrastruktur Ekonomi, 2011-2015

Sub-dimensi	Indikator	Nilai Skor					Capaian Nilai				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB per kapita	3,94	4,11	4,23	3,94	3,74	3,94	4,11	4,23	3,94	3,74
	Share sektor industri, jasa, dan pertanian terhadap total PDRB	5,38	5,46	5,43	5,46	5,45	46,21	45,42	45,66	45,36	45,54
Tenaga Kerja Produktif	Persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja	8,92	9,04	9,19	9,17	8,98	95,68	96,14	96,76	96,67	95,93
	Share tenaga kerja industri pengolahan	4,89	4,99	4,45	4,66	4,87	14,68	14,97	13,36	13,97	14,61
	Share tenaga kerja berusaha sendiri dan pekerja keluarga tidak dibayar	4,45	4,22	4,20	4,27	4,51	27,75	28,88	29,02	28,67	27,46
	Tenaga kerja yang berpenghasilan di bawah UMP	8,47	6,63	7,80	8,04	6,07	46,13	53,47	48,82	47,85	55,74
Infrastruktur Ekonomi	Proporsi penduduk akses ke listrik	9,53	9,81	9,65	9,66	9,82	99,53	99,81	99,65	99,66	99,82
	Persentase rumah tangga memiliki telepon seluler/pelanggan seluler per 100 orang	3,63	4,12	4,33	4,46	5,60	49,07	52,99	54,6	55,71	64,79

Sumber: Hasil Olahan

Setiap tahun nilai UMP dan UMK (upah minimum kabupaten/kota) ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) daerah setempat yang diusulkan oleh dewan pengupahan yang terdiri dari Apindo, serikat pekerja, BPS, pakar, dan Kemenakertrans. Besaran UMP tersebut meningkat tiap tahun mengikuti peningkatan KHL. Hingga tahun 2015 Gubernur DIY telah menetapkan besaran UMP dan UMK yang lebih besar dari KHL di masing-masing kabupaten/kota. Pada tahun 2015 besaran UMK yang ditetapkan gubernur adalah Kota Yogyakarta Rp1.302.500, Kabupaten Sleman Rp1.200.000, Kabupaten Bantul Rp1.1663.800, Kabupaten Kulon Progo Rp1.138.000, dan Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp1.108.249. Selama tahun 2011-2015 rasio rata-rata UMP yang telah ditetapkan gubernur terhadap KHL selalu di atas 100 persen (Tabel 4.5).

Sub-dimensi terakhir pada dimensi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif, dan infrastruktur ekonomi adalah sub-dimensi infrastruktur ekonomi, yang mencakup akses penduduk terhadap listrik dan persentase rumah tangga memiliki telepon seluler/pelanggan seluler per 100 orang. Tampaknya, selama periode 2011-2015, kedua indikator tersebut menunjukkan tren peningkatan kinerja. Peningkatan skor pada indikator proporsi penduduk akses listrik ditunjukkan

dengan semakin banyaknya penduduk yang dapat menikmati listrik. Pada tahun 2011, sebanyak 99,53 persen penduduk telah menikmati listrik. Angka ini meningkat menjadi 99,82 persen pada tahun 2015. Demikian pula indikator persentase rumah tangga pelanggan seluler skornya meningkat terus, dari 3,63 di tahun 2011 menjadi 5,60 pada tahun 2015. Peningkatan skor indikator ini ditunjukkan oleh peningkatan persentase rumah tangga pelanggan seluler dari 49,07 persen menjadi 64,79 persen (Tabel 4.4.).

Tabel 4.5 KHL dan UMP/K di DIY, 2011-2015

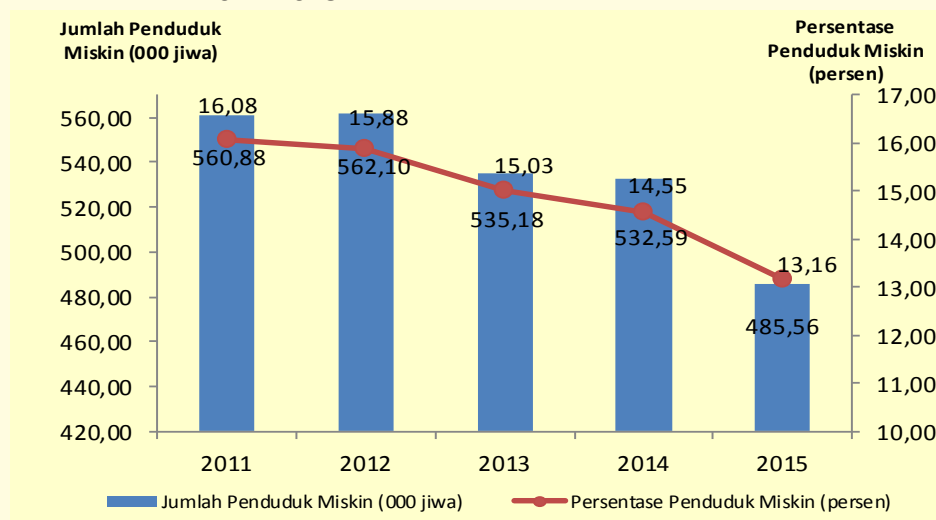
NO	KAB/KOTA	TAHUN 2011 *		TAHUN 2012 *		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015	
		KHL	UMP	KHL	UMP	KHL	UMK	KHL	UMK	KHL	UMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KOTA	802.339	808.000	862.390	892.660	1.046.515	1.065.247	1.150.290	1.173.300	1.272.420	1.302.500
2	SLEMAN					1.024.440	1.026.181	1.048.788	1.127.000	1.198.142	1.200.000
3	BANTUL					965.391	993.484	1.125.429	1.125.500	1.163.771	1.163.800
4	KULONPROGO					925.734	954.339	1.149.473	1.069.000	1.112.978	1.138.000
5	GUNUNGKIDUL					924.284	947.114	969.072	988.500	1.086.226	1.108.249
UMP/ RATA-RATA		802.339	808.000	862.390	892.660	977.273	997.273	1.088.610	1.096.660	1.166.707	1.182.510
Prosentase UMP/K thd KHL		100,71		103,51		102,05		100,74		101,35	
* Tahun 2011 dan 2012 belum menggunakan UMK, Tetapi Upah Minimum Provinsi (UMP)											
Sumber : Disnakertrans DIY											

b. Dimensi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Dimensi ini hanya mencakup dua sub-dimensi, yaitu kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Sub-dimensi kemiskinan diukur melalui indikator persentase jumlah penduduk miskin untuk setiap tahunnya. Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa capaian kepuasan indikator ini cukup baik karena selalu meningkat selama periode 2011-2015. Apabila ditinjau dari perbandingan persentase penduduk miskin selama periode 2011-2015 memang terus mengalami penurunan (dari 16,08 persen menjadi 13,16 persen). Sehingga, angka indeks IGI indikator kemiskinan selama periode tersebut menjadi terus meningkat. Kenaikan capaian kepuasan indikator kemiskinan dipertegas dengan penurunan persentase penduduk miskin.

Sejak 2011, jumlah maupun persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun, meskipun pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 1,22 ribu jiwa. Bahkan pada tahun 2015, jumlah dan persentase penduduk miskin menurun signifikan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 47,03 ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya dan persentase penduduk miskin turun menjadi 13,16 persen dari 14,55 persen di tahun 2014. Dengan demikian dalam kurun waktu 2011-2015, rata-rata terjadi penurunan jumlah penduduk

Gambar 4.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin D.I. Yogyakarta, 2011-2015



Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016

Tabel 4.6. Nilai dan Capaian Indikator Dimensi Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Produktif, dan Infrastruktur Ekonomi, 2011-2015

Sub-dimensi	Indikator	Nilai Skor					Capaian Nilai				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	3,54	3,65	3,99	4,18	4,74	16,14	15,88	15,03	14,55	13,16
Ketimpangan Pendapatan	Koefisien Gini	6,00	5,70	5,61	5,81	5,67	0,400	0,430	0,439	0,419	0,433
	Share Pendapatan 60 % Terendah dari Populasi	5,77	6,26	4,89	4,78	4,95	34,63	37,59	29,32	28,68	29,71
	Ketimpangan Desa dan Kota	7,63	7,88	8,06	8,40	7,66	0,237	0,212	0,194	0,16	0,234

Sumber: Hasil Olahan

miskin sebanyak 18,83 ribu jiwa setiap tahunnya atau rata-rata terjadi pengurangan persentase penduduk miskin sebesar 0,73 persen setiap tahunnya. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah melalui program-programnya dalam menekan jumlah penduduk miskin di DIY.

Sementara itu untuk capaian kepuasan sub-dimensi ketimpangan pendapatan kondisinya cenderung menurun. Pada tahun 2011 dan 2012 indeks sub-dimensi ini sebesar 0,65 dan 0,66, turun menjadi 0,62 dan pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 sedikit naik lagi menjadi 0,63. Pada tahun 2015 indeks sub-dimensi turun lagi menjadi 0,61. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya nilai dan skor 3 (tiga) indikator di dalamnya (koefisien rasio gini, *share* dari 60% penduduk berpenghasilan terendah, dan ketimpangan desa dan kota).

Penurunan skor koefisien gini dari 6,0 menjadi 5,7 pada 2012, diakibatkan oleh kenaikan rasio gini dari 0,40 menjadi 0,43. Peningkatan rasio gini ini mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat yang semakin melebar di tengah peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY di tahun itu. Hal ini terulang di tahun 2013, yaitu pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi koefisien gini juga meningkat, sehingga skor indikator koefisien gini kembali menurun. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi melambat tetapi koefisien gini ikut melambat. Kondisi ini menyebabkan skor indikator ini bertambah menjadi 5,81. Namun di tahun 2015 seiring meningkatnya koefisien gini, berdampak menyebabkan skor indikator ini menurun lagi menjadi 5,67.

Dalam kurun waktu 2011-2015 perkembangan *share* pendapatan dari 60% penduduk berpendapatan terendah menunjukkan tren menurun, meskipun sempat meningkat di tahun 2012. Pada tahun 2011 *share* golongan penduduk tersebut sebesar 34,63 persen turun menjadi 29,71 persen pada 2015, atau rata-rata penurunannya sebesar 1,23 persen per tahun. Hal ini yang menyebabkan nilai skor indikator ini memperlihatkan tren menurun. Namun, penurunan tersebut *cancel out* oleh peningkatan ketimpangan desa dan kota dari 0,16 tahun 2014 menjadi 0,23 pada tahun 2015. Peningkatan ketimpangan pendapatan 2 (dua) indikator ini memperburuk keadaan naiknya koefisien gini sebagaimana telah dikemukakan di atas, sehingga perkembangan nilai skor dan indeks sub-dimensi ketimpangan pendapatan terlihat semakin menurun.

c. Dimensi Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu sensitif khususnya pada negara-negara berkembang. Perlakuan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan pada beberapa bidang yang disinyalir masih terjadi, mengakibatkan perempuan memiliki kesempatan yang lebih rendah dari laki-laki. Oleh karena itu, pengukuran dimensi ini dirasa penting dan senantiasa dipantau perkembangannya setiap tahun.

Menilik pada hasil pengukuran indeks IGI pada Tabel 4.3. di atas, indeks dimensi kesetaraan gender cenderung stagnan selama lima tahun periode kajian, yaitu sebesar 0,45 dari tahun 2011

hingga tahun 2014, dan sedikit menurun menjadi 0,44 pada tahun 2015. Pengukuran dimensi ini untuk DIY mencakup tiga indikator, yaitu rasio perempuan dengan laki-laki yang melek huruf usia 15-24 tahun, rasio anak perempuan yang berpendidikan menengah, dan *share* perempuan dalam pekerjaan yang dibayar pada sektor non-pertanian.

Skor rasio perempuan dengan laki-laki yang melek huruf usia 15-24 tahun telah mencapai nilai maksimum 10 pada tahun 2011 namun sedikit menurun pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan telah mendapat porsi yang sama atau hampir sama den-

Tabel 4.7. Nilai dan Capaian Indikator Dimensi Kesetaraan Gender, 2011-2015

Sub-dimensi	Indikator	Nilai Skor					Capaian Nilai				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Kesetaraan Gender	Rasio Perempuan dengan Laki-laki yang Melek Huruf (Usia 15-24 Th)	10,00	9,63	9,16	9,43	9,69	1,08	0,96	0,92	0,94	0,97
	Rasio Anak Perempuan Berpendidikan Menengah	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1,42	1,07	1,37	1,00	1,46
	Share Perempuan dalam Pekerjaan Dibayar non Pertanian	6,86	7,38	7,76	7,57	6,95	34,29	36,89	38,79	37,83	34,76

Sumber: Hasil Olahan

gan laki-laki untuk memperoleh pendidikan di DIY. Kondisi ini didukung oleh rasio antara keduanya yang bernilai mendekati satu pada seluruh periode, bahkan di tahun 2011 rasionya lebih dari satu.

Demikian pula, bila ditinjau dari kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan menengah, ternyata rasionya semua bernilai di atas 1. Artinya, kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan menengah lebih besar dibanding laki-laki. Oleh karena itu nilai skor indikator ini diberi nilai 10. Keadaan ini dimungkinkan pula oleh karena secara total penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan laki-laki.

Indikator ketiga dalam dimensi kesetaraan gender adalah *share* perempuan dalam pekerjaan yang dibayar pada sektor non-pertanian. Indikator ini menggambarkan seberapa besar akses perempuan memperoleh pekerjaan pada sektor non-pertanian. Capaian indikator ini berfluktuasi selama periode 2011-2015. Kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2013, namun tampaknya di tahun-tahun berikutnya terus mengalami degradasi. Degradasi yang terjadi cukup besar di tahun 2015, dan mengakibatkan capaian nilai skor lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Kondisi capaian nilai dan nilai skor indikator-indikator dalam dimensi kesetaraan gender yang saling *cancel out* itulah yang menyebabkan indeks IGI dimensi relatif stagnan di awal dan di akhir periode kajian.

d. Dimensi Kapabilitas Manusia

Sejauh ini, pembahasan mengenai ke-inklusifan pada pertumbuhan ekonomi sebagaimana dikemukakan di atas, terutama yang terkait dengan kemiskinan, distribusi pendapatan dan tenaga kerja produktif, lebih difokuskan pada sisi kebutuhan (*demand side*) pencapaian kesempatan akses yang sama terhadap pertumbuhan ekonomi. Indikator-indikator tersebut ditujukan untuk menggambarkan apakah terdapat kesempatan yang sama dalam masyarakat terkait tenaga kerja, dan besaran serta distribusi dari pendapatan yang diperoleh. Selain *demand side*, *supply side* juga perlu diperhatikan terutama untuk mengetahui apakah indikator-indikator yang terkait den-

gan kapabilitas manusia (*human capabilities*) perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan ekonomi yang ada (ADB, 2010).

Pengukuran indeks dimensi kapabilitas manusia di sini mencakup tiga sub-dimensi, yaitu kesehatan dan gizi, pendidikan, dan air dan sanitasi, yang melibatkan sepuluh indikator. Ketiga sub-dimensi tersebut, menyumbang indeks hampir sama besar selama periode 2011-2015 (berkisar 0,41 sampai dengan 0,45 untuk semua indeks di semua tahun). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa selama periode tersebut, ketiga sub-dimensi tersebut mengalami pertumbuhan yang hampir stagnan. Namun, bila dilihat lebih mendalam menurut indikator pengukurnya, ternyata capaian indikator sedikit berfluktuasi selama periode tersebut. Oleh karena fluktuasi pada indikator-indikator tersebut bersifat kecil dan saling *cancel-out*, maka perkembangan hasil pengukuran pada setiap sub-dimensi bersifat stagnan.

Untuk menyesuaikan kondisi DIY, terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur sub-dimensi kesehatan dan gizi, yaitu indikator persentase kelahiran dibantu tenaga kesehatan terampil, persentase balita yang pernah diimunisasi, persentase balita yang pernah diberi ASI eksklusif, dan angka harapan hidup. Sebagaimana dijelaskan pada bagian metodologi, ADB menggunakan tiga indikator untuk mengukur sub-dimensi ini, yaitu tingkat kematian balita (*under-5 mortality rate*), tingkat kematian usia di bawah 40 tahun (*mortality rate for under age 40*) dan persentase anak usia di bawah 5 tahun yang memiliki berat yang kurang dari normal (*percentage of those under age 5 years who are underweight*). Sayangnya, ketersediaan data ketiga indikator ini di Indonesia dan juga DIY masih sangat terbatas. Sebagai contoh, angka kematian balita belum tersedia setiap tahun sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran dan analisis antar tahun. Hal ini juga terjadi pada indikator balita dengan berat kurang dari normal. Sementara data tingkat kematian usia di bawah 40 tahun tampaknya belum tersedia dengan baik. Oleh karena itu, indikator persentase kelahiran dibantu tenaga kesehatan terampil, indikator persentase balita yang pernah diimunisasi, persentase balita yang pernah diberi ASI eksklusif, dan indikator harapan hidup digunakan sebagai proxy untuk menggantikan ketiga indikator yang digunakan oleh ADB.

Berdasarkan Tabel 4.8, keempat indikator di dalam sub-dimensi kesehatan dan gizi memberikan skor di atas 7 pada lima tahun periode kajian. Skor ini mengindikasikan bahwa hampir semua bayi di DIY telah mendapat pertolongan tenaga kesehatan yang terampil pada saat kela-

Tabel 4.8. Nilai dan Capaian Indikator Dimensi Kapabilitas Manusia, 2011-2015

Sub-dimensi	Indikator	Nilai Skor					Capaian Nilai				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Kesehatan dan Gizi	Persentase Kelahiran Dibantu Tenaga Kesehatan Terampil	9,66	9,40	9,88	9,92	9,74	99,32	98,79	99,75	99,84	99,49
	Persentase Balita Yang Pernah Diimunisasi	9,68	9,65	9,63	9,42	7,94	99,37	99,30	99,25	98,84	95,88
	Rata-rata Balita Yang Pernah diberi ASI Eksklusif	7,46	7,44	7,82	8,27	7,22	4,48	4,46	4,69	4,96	4,33
	Angka Harapan Hidup	8,21	8,23	8,24	8,25	8,28	74,26	74,36	74,45	74,50	74,68
Pendidikan	Angka Melek Huruf	9,15	9,20	9,29	9,69	9,49	91,49	92,02	92,86	96,87	94,95
	Rata-rata Lama Sekolah	5,69	5,75	5,82	5,89	6,00	8,53	8,63	8,72	8,84	9,00
	APM SD	9,46	9,77	9,96	9,94	9,89	99,46	99,77	99,96	99,94	99,89
	APM SLTP	8,80	9,16	8,31	9,74	9,84	97,59	98,32	96,63	99,48	99,68
Air dan Sanitasi	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Air Bersih	8,91	8,94	9,08	9,00	9,22	89,12	89,37	90,78	89,98	92,23
	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi	8,38	8,45	8,37	8,30	8,70	83,82	84,46	83,68	83,02	86,99

Sumber: Hasil Olahan

hirannya. Indikator berikutnya juga menunjukkan bahwa sebagian besar balita di DIY memiliki kesempatan sama dalam bidang kesehatan, khususnya imunisasi. Tingginya skor kedua indikator tersebut didukung oleh capaian persentase yang melebihi 95 persen pada seluruh periode. Pada indikator rata-rata balita yang pernah diberi ASI eksklusif, capaian skor nilai skor di atas 7. Artinya, lebih dari 70 persen balita di DIY pernah diberi ASI eksklusif, ini mengindikasikan derajat kesehatan yang tinggi. Bahkan di tahun 2014 nilai skor mencapai 8,27.

Di sisi lain, harapan hidup penduduk DIY mengalami kenaikan setiap tahunnya. Angka harapan hidup (AHH) DIY merupakan yang tertinggi se-Indonesia. Pada tahun 2011, AHH DIY diperkirakan mencapai 74,26 tahun, meningkat menjadi 74,68 pada 2015. Peningkatan harapan hidup ini biasanya digunakan sebagai salah satu indikator pengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara atau wilayah yang merupakan rangkuman capaian beberapa bidang, baik kesehatan, ekonomi, lingkungan dan sebagainya.

Sub-dimensi kedua dalam pengukuran dimensi kapabilitas manusia adalah pendidikan. Dalam kajian ini mengimplementasikan empat indikator untuk mengukur skor dari sub-dimensi ini, yaitu angka melek huruf, angka partisipasi murni (APM) SD, APM SMP, dan rata-rata lama sekolah (mean year of schooling/ MYS). APM SMP sengaja dipakai dalam kajian ini mengingat target wajib belajar pendidikan dasar sudah sampai 9 tahun. APM menggambarkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Angka ini bermanfaat untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Dengan kata lain, angka ini menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Skor pada indikator APM SD di DIY telah sangat tinggi, mendekati nilai maksimal 100. Pada tahun 2013, skor indikator ini sebesar 9,96 dikarenakan sebanyak 99,96 dari 100 anak usia SD telah menempuh pendidikan SD tepat pada waktunya. Namun angka APM SD ini sedikit menurun pada tahun 2015 menjadi 99,89. Sementara untuk indikator APM SMP juga relatif tinggi yaitu pada seluruh periode sudah di atas 96 sehingga skor indikator ini di atas 8, bahkan di tahun 2015 sudah mencapai 9,84.

Indikator lain yang merepresentasikan kesempatan penduduk dalam memperoleh pendidikan ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah (MYS). Angka ini menggambarkan kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Angka MYS ini menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki seseorang. Dengan demikian, semakin tinggi angka MYS, semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Indikator MYS ini juga digunakan untuk mengukur seberapa besar capaian yang telah diraih suatu negara atau wilayah dalam pembangunan manusianya, yang dikenal dengan indeks pembangunan manusia (IPM).

Besaran angka MYS DIY pada tahun 2011 sebesar 8,53 tahun dan terus meningkat mencapai 9 tahun di tahun 2015. Ini berarti bahwa rata-rata lama pendidikan yang ditempuh oleh penduduk DIY yang berumur 25 tahun ke atas adalah selama 9 tahun, atau dapat dikonversikan telah lulus SMP. Hal ini berarti bahwa penduduk DIY berumur 25 tahun ke atas sudah mentas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Sub-dimensi terakhir dalam pengukuran indeks pada dimensi kapabilitas manusia adalah indikator proporsi rumah tangga/penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Kedua indikator ini juga digunakan oleh ADB, sebagai pelengkap bagi sub-dimensi kesehatan dan pendidikan dalam pengukuran dimensi ini. Tampaknya informasi yang diberikan oleh sub-dimensi ini tidak kalah jauh dibanding sub-dimensi kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 2011 sekitar 89,12 persen rumah tangga di DIY memiliki akses ke air bersih. Pada tahun-tahun berikutnya angka tersebut meningkat dan mencapai 92,23 persen pada tahun 2015. Sementara untuk indikator persentase rumah yang memiliki akses sanitasi juga memiliki tren yang meningkat. Pada tahun

2011, sekitar 83,82 persen rumah tangga di DIY yang memiliki akses sanitasi. Meskipun angka tersebut sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 83,02 persen, namun di tahun 2015 meningkat lagi menjadi 86,99 persen. Angka ini sudah melampaui target *MDGs* yang sebesar 62,41 persen pada tahun 2015. Sehingga, kedua indikator dalam sub-dimensi ini pada tahun 2015 nilai skornya juga sudah relatif tinggi, yaitu 9,22 dan 8,70.

Prestasi pencapaian nilai skor indikator-indikator dalam sub-dimensi air dan sanitasi ternyata mampu mendorong meningkatnya kontribusi indeks sub-dimensi ini hingga melampaui nilai indeks sub-dimensi kesehatan dan pendidikan pada tahun 2015.

e. Dimensi Perlindungan Sosial

Dimensi terakhir dalam pengukuran indeks IGI adalah dimensi perlindungan sosial. Sebagaimana dikemukakan pada bab kajian literatur, dimensi ini merupakan dimensi tambahan dalam kerangka strategis pengukuran *inklusif growth*. Dimensi ini menyediakan tempat bagi hal-hal yang terkait dengan penduduk miskin yang lebih ekstrim atau parah, yang sangat sulit untuk memperoleh kesempatan yang disediakan oleh pertumbuhan yang inklusif.

Dengan demikian, penghitungan indeks IGI juga mencakup pada kelompok masyarakat ini. Namun, permasalahan muncul ketika indikator *share* bantuan sosial digunakan untuk merepresentasikan dimensi ini. Apabila dihitung *share* jumlah penduduk yang menerima bantuan sosial terhadap penduduk miskin, maka diperoleh *share* yang lebih besar dari satu. Hal ini terjadi diduga karena adanya kesalahan baik dalam pendataan, pendistribusian, atau adanya konflik (protes) dalam sebagian masyarakat yang berakibat penerima bantuan sosial juga berasal dari mereka yang dianggap mampu. Berita-berita seputar pembagian BLT atau Balsem banyak menginformasikan hal-hal ini. Di sisi lain, memperoleh data yang valid alokasi jumlah bantuan sosial yang diterima penduduk juga sulit karena sebagian ada yang masuk APBN/APBD sebagian lainnya langsung diterima penduduk baik yang sifatnya langsung atau melalui lembaga swadaya masyarakat. Untuk yang masuk dalam APBD tidak sulit untuk menghimpunnya, namun yang di luar APBN/APBD sulit untuk memperolehnya. Oleh karena itu, *proxy* yang dipilih adalah menggunakan indikator

Tabel 4.9. Nilai dan Capaian Indikator Dimensi Perlindungan Sosial, 2011-2015

Sub-dimensi	Indikator	Nilai Skor					Capaian Nilai				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Perlindungan Sosial	Persentase RT penerima raskin	4,09	4,54	4,69	4,61	4,00	40,94	45,39	46,91	46,12	39,96
	Rata-rata Jumlah Raskin per bulan	7,19	8,03	7,35	7,58	6,00	7,19	8,03	7,35	7,58	6,00

Sumber: Hasil Olahan

persentase rumah tangga penerima raskin dan rata-rata jumlah raskin per bulan. Pemilihan konsep ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penduduk Indonesia yang telah memperoleh perlindungan sosial dari pemerintah.

Jumlah rumah tangga yang menerima alokasi beras untuk rakyat miskin (raskin) selama periode 2011 -2015 ternyata berfluktuasi. Kondisi tersebut biasanya juga mendapat intervensi situasi politik dan sosial yang berjalan. Terlihat bahwa menjelang pergantian kendali pemerintahan terjadi lonjakan rumah tangga penerima raskin dari sekitar 41 persen menjadi 46,9 persen pada tahun 2013 dan juga masih sekitar 46 persen di tahun 2014. Namun setelah suhu politik mereda dengan telah terbentuknya pemerintahan baru, persentase rumah tangga penerima raskin kembali menurun pada kisaran 40 persen.

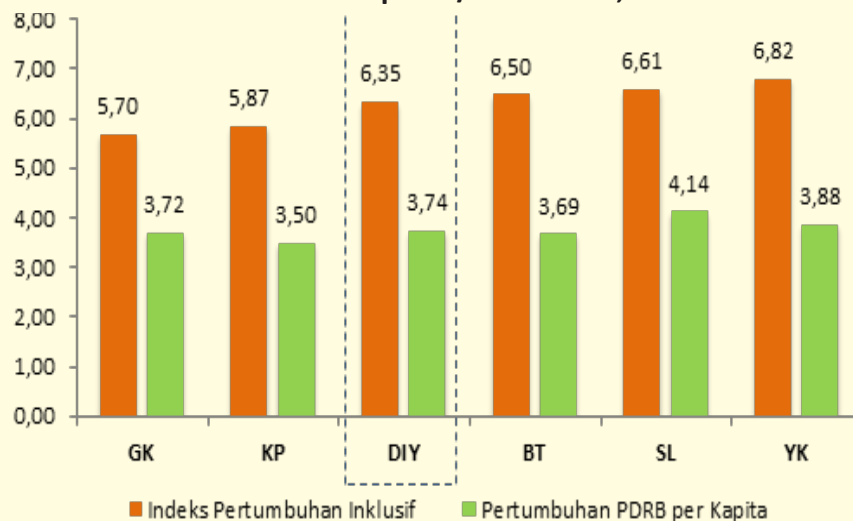
Indikator berikutnya adalah rata-rata jumlah raskin yang diterima per bulan. Sebenarnya,

dalam konsep pembagian raskin sudah teralokasikan nama penerima dan jumlah kg yang diterima. Namun dalam prakteknya, sering dijumpai penerimaan raskin dilakukan dengan bagi rata. Artinya, sebagian besar masyarakat menerima sehingga rata-rata yang diterima lebih sedikit karena terbagi untuk lebih banyak rumah tangga. Rata-rata dari nilai skor kedua indikator ini menghasilkan kontribusi dimensi perlindungan sosial terhadap indeks IGI antara 0,50-0,61 dalam lima tahun periode kajian.

4.3. Perbandingan IGI Antarkabupaten/kota se-DIY menurut Dimensi

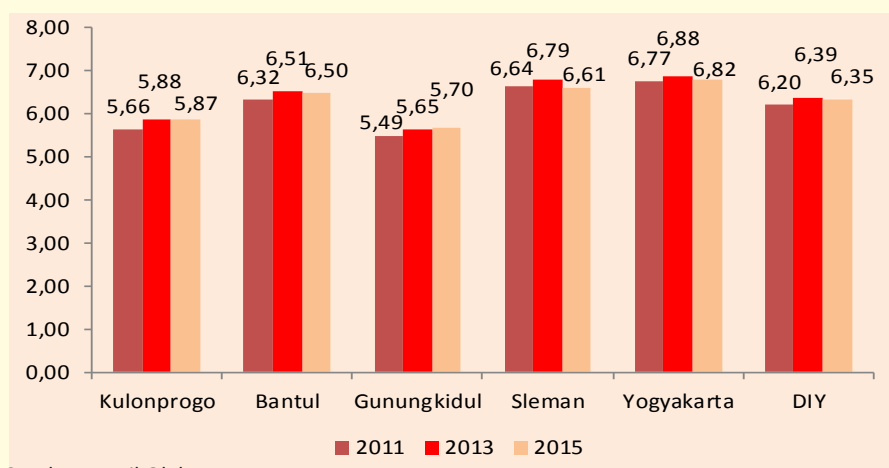
Hasil penghitungan IGI tahun 2015 di D.I.Yogyakarta menunjukkan bahwa nilai IGI Provinsi D.I.Yogyakarta sebesar 6,35, sementara nilai IGI kabupaten/kota berkisar pada level 5,70 – 6,82, sehingga masih tergolong dalam kategori pertumbuhan ekonomi yang memuaskan. Meskipun capaian IGI kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta berkategori memuaskan namun tampaknya masih menyiratkan inklusivitas ketimpangan antarkabupaten/kota di D.I.Yogyakarta. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman meraih nilai IGI tertinggi dengan perolehan indeks masing-masing sebesar 6,82 dan 6,61. Selanjutnya, Kabupaten Bantul menempati posisi ketiga tertinggi dengan indeks sebesar 6,50. Ketiga kabupaten tersebut berada di atas nilai IGI D.I.Yogyakarta. Sebaliknya, dua kabupaten/kota mempunyai capaian indeks di bawah D.I.Yogyakarta, yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul dengan capaian IGI masing-masing sebesar 5,87 dan 5,70, terpaut cukup jauh baik dengan indeks provinsi maupun kabupaten/kota lain.

Gambar 4.4. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota se DIY, 2015



Sumber: Hasil Olahan

Gambar 4.5. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota se DIY, 2011, 2013, dan 2015



Sumber: Hasil Olahan

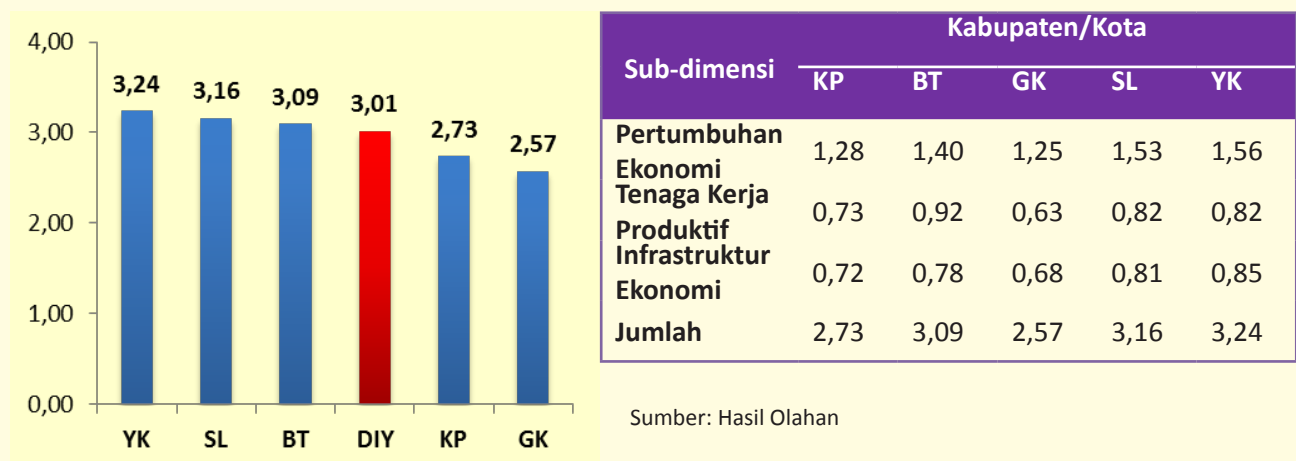
Untuk memperjelas capaian kepuasan indeks IGI pada level kabupaten/kota sehingga dapat memberikan gambaran secara lebih rinci mengapa capaian indeks IGI suatu kabupaten/kota lebih tinggi atau rendah daripada kabupaten/kota lainnya di D.I. Yogyakarta, berikut secara ringkas diuraikan capaian kepuasan menurut dimensi.

a. Dimensi Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Produktif, dan Infrastruktur Ekonomi

Pada dimensi ini, tiga kabupaten/kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, memperoleh skor di atas capaian D.I.Yogyakarta, dan sebaliknya dua kabupaten, yakni Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul berada di bawah skor capaian level provinsi. Hal ini dikarenakan sub-dimensi pertumbuhan ekonomi pada indikator *share* PDRB sektor Industri, Jasa dan Pertanian di Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul disumbang terutama oleh sektor Pertanian yang merupakan mata pencaharian utama bagi penduduk. Sementara itu, di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta *share* sektor Pertanian dan Industri Pengolahan terhadap total PDRB relatif lebih kecil. Nilai PDRB di kabupaten/kota ini terdistribusi pada sektor lain, terutama sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Keuangan, sektor Sewa Bangunan dan sektor Jasa Perusahaan, serta sektor Transportasi dan Komunikasi. Indikator *share* tenaga kerja sektor industri dan *share* tenaga kerja berusaha sendiri dan pekerja keluarga tidak dibayar mempunyai ciri yang hampir sama dengan indikator *share* PDRB sektor Industri, Jasa, dan Pertanian.

Di sisi lain, capaian indeks indikator lainnya, yaitu: pertumbuhan pendapatan per kapita, persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja, proporsi penduduk yang memiliki akses listrik, dan persentase rumah tangga pelanggan/pengguna telepon seluler relatif merata antar kabupaten/kota. Kabupaten Bantul menempati tingkat capaian kepuasan tertinggi untuk sub-dimensi tenaga kerja produktif. Posisi tertinggi untuk capaian kepuasan sub-dimensi pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur ekonomi berada di Yogyakarta dan Sleman.

Gambar 4.6. Indeks Dimensi Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Produktif, dan Infrastruktur Ekonomi Kabupaten/Kota se D.I.Yogyakarta, 2015

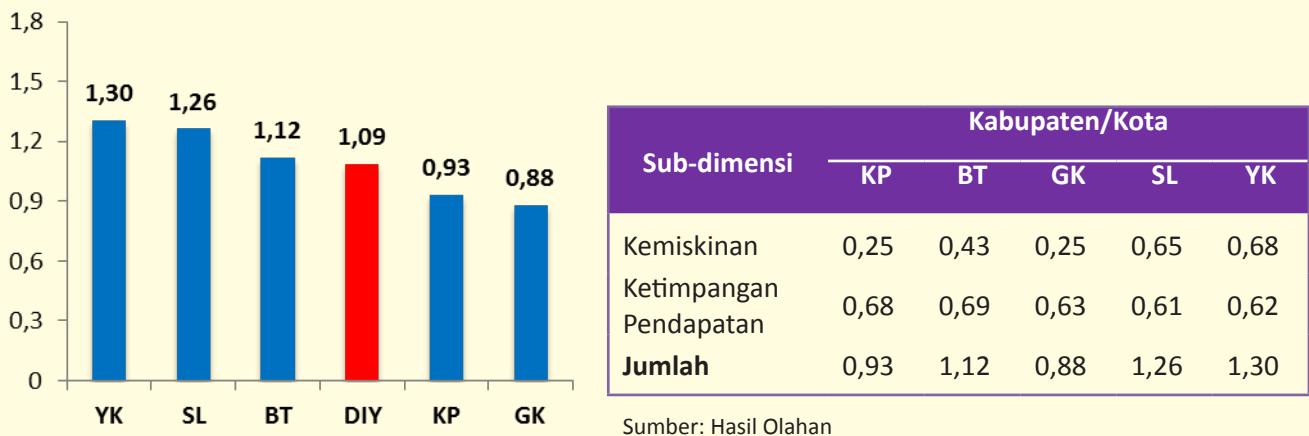


b. Dimensi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Pada dimensi ini, di tahun 2015 persebaran kabupaten/kota sama dengan posisi pada dimensi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif, dan infrastruktur ekonomi di atas meskipun bila dilihat pada sub-dimensi persebarannya berbeda. Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul mempunyai angka indeks dimensi di bawah indeks DIY (1,09), sedangkan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul memperoleh indeks di atas indeks provinsi yaitu masing-masing sebesar 1,30, 1,26, dan 1,12. Persentase kemiskinan Kota Yogyakarta sebesar 8,01 persen sekaligus merupakan yang terkecil se-D.I.Yogyakarta, sedikit di bawahnya ialah Kabupaten Sleman sebesar 8,69 persen, Bantul sebesar 14,36 persen, dan Kulon Progo dan Gunungkidul persentase kemiskinannya masih relatif tinggi masing-masing sebesar 18,83 persen. Indikator ke-

timpangan pendapatan penduduk yang direpresentasikan dengan koefisien gini, tiga kabupaten yaitu Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul, memiliki ketimpangan pendapatan masing-masing 0,37, 0,38, dan 0,32 dan posisinya di bawah angka provinsi (0,43). Sebaliknya, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mempunyai angka ketimpangan yang tinggi yaitu masing-masing 0,45. Oleh karena itu di wilayah DIY ini mempunyai dua permasalahan yang berbeda cara penanganannya. Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul memiliki kemiskinan relatif tinggi namun tingkat ketimpangan distribusi pendapatan lebih rendah. Sebaliknya, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mempunyai kemiskinan relatif lebih rendah tetapi distribusi pendapatan mengalami kesenjangan cukup lebar.

Gambar 4.7. Indeks Dimensi Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten/Kota se D.I.Yogyakarta, 2015



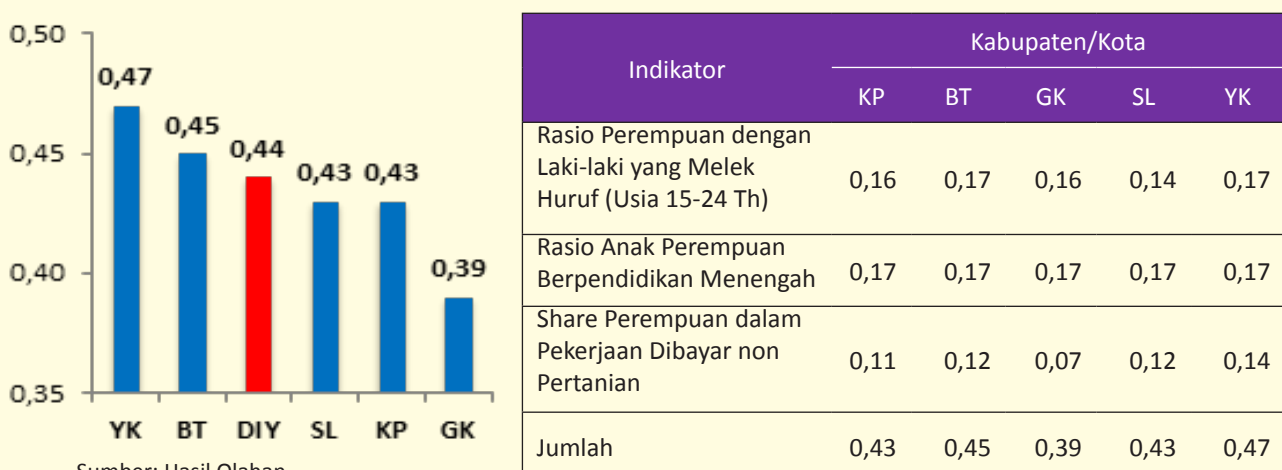
c. Dimensi Kesetaraan Gender

Pada dimensi kesetaraan gender ini, di tahun 2015 Kota Yogyakarta memiliki indeks tertinggi (0,47) dan Kabupaten Gunungkidul kembali berada pada indeks terendah (0,39). Sementara tiga kabupaten lainnya, Bantul sebesar 0,45, Kulon Progo dan Sleman masing-masing sebesar 0,43.

Di antara lima kabupaten/kota, Kabupaten Kulon Progo mengalami kontraksi indeks terbesar yaitu 10,14 persen. Gunungkidul dan Sleman juga tumbuh negatif, masing-masing -5,78 persen dan -3,04 persen. Sebaliknya, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan indeks positif, yaitu 2,92 persen dan 0,33 persen.

Membaiknya indeks dimensi kesetaraan gender di Bantul terutama didukung oleh keberhasilan pemerintah kabupaten tersebut dalam meningkatkan partisipasi pendidikan penduduk

Gambar 4.8. Indeks Dimensi Kesetaraan Gender Kabupaten/Kota se D.I.Yogyakarta, 2015



perempuan usia 15-24 tahun. Sementara untuk Kota Yogyakarta didukung oleh keberhasilan pemerintah kota dalam memperluas *share* perempuan dalam pekerjaan dibayar sektor non-pertanian. Sebaliknya, kontraksi yang tinggi dimensi kesetaraan gender Kulon Progo di tahun 2015 lebih disebabkan oleh menurunnya partisipasi pendidikan penduduk perempuan usia 15-24 tahun, dan juga menurunnya *share* perempuan dalam pekerjaan dibayar sektor non-pertanian..

d. Dimensi Kapabilitas Manusia

Berbeda dengan dimensi kesetaraan gender, pada dimensi kapabilitas manusia, semua kabupaten/kota tidak banyak mengalami perubahan (relatif stagnan) selama periode 2011-2015. Fluktuasi antartahun dan variasi antarkabupaten/kota relatif kecil. Pada tahun 2015 angka indeks berselang antara 1,20 di Gunungkidul dan 1,36 di Kota Yogyakarta. Sementara kabupaten lainnya, Kulon Progo sebesar 1,22, Bantul sebesar 1,31, dan Sleman sebesar 1,35.

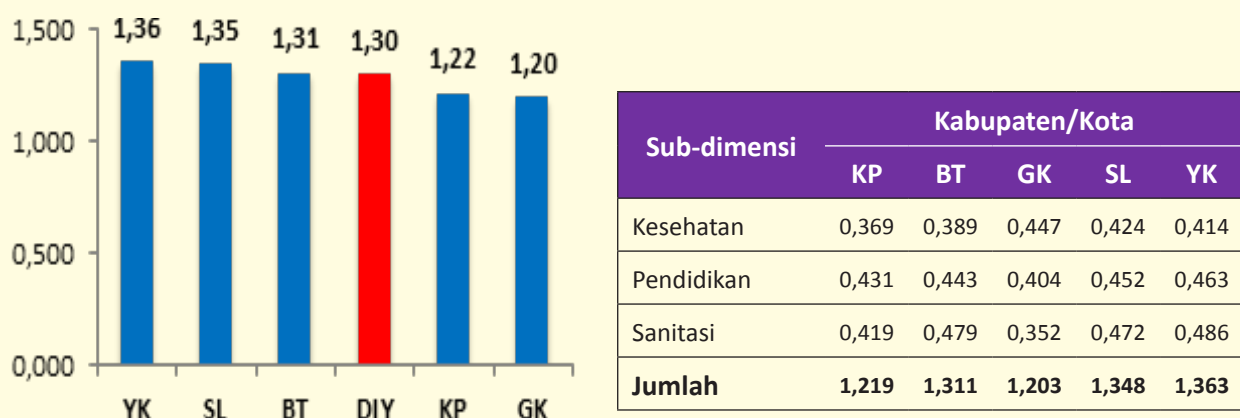
Tingginya capaian indeks dimensi kapabilitas manusia di kabupaten/kota di DIY ini lebih didukung oleh tingginya nilai skor indikator di sub-dimensi kesehatan yaitu persentase kelahiran dibantu tenaga kesehatan terampil, persentase balita yang pernah diimunisasi, rata-rata balita yang pernah diimunisasi, dan angka harapan hidup. Demikian pula sub-dimensi pendidikan juga mencapai nilai skor relatif tinggi terutama indikator angka melek huruf, angka partisipasi murni (APM) SD, dan APM SMP.

Persentase kelahiran dibantu tenaga terampil persentase untuk keseluruhan periode dan di semua kabupaten/kota telah mencapai di atas 97 persen. Hampir semua periode dan juga di semua wilayah kabupaten/kota persentase balita yang pernah diberi imunisasi sudah mencapai di atas 95 persen. Angka harapan hidup DIY merupakan yang tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, sehingga indikator ini juga turut mendorong capaian kepuasan indeks sub-dimensi kesehatan di kabupaten/kota.

Pada dimensi kapabilitas manusia ini, indikator yang belum mencapai kepuasan yang lebih menggembirakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean year of schooling*) penduduk usia 25 tahun ke atas. Angka indeks indikator ini berselang antara 0,05 di Kabupaten Gunungkidul dan 0,10 di Kota Yogyakarta. Sementara itu indikator persentase angka melek huruf, nilai capaiannya berselang cukup lebar, yaitu antara sekitar 85 persen di Gunungkidul dan sekitar 99 persen di Kota Yogyakarta.

Indikator proporsi rumah tangga yang memiliki akses ke air bersih telah mencapai secara rata-rata telah mencapai di atas 90 persen, kecuali Gunungkidul yang masih sekitar 73 persen. Untuk indikator proporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi, tiga kabupaten/kota telah

Gambar 4.9. Indeks Dimensi Kapabilitas Manusia Kabupaten/Kota se D.I.Yogyakarta, 2015



Sumber: Hasil Olahan

mencapai di atas 92 persen, sedangkan Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul masing-masing baru mencapai sekitar 77 persen dan 67 persen. Hal ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas akses sanitasi di kedua kabupaten ini.

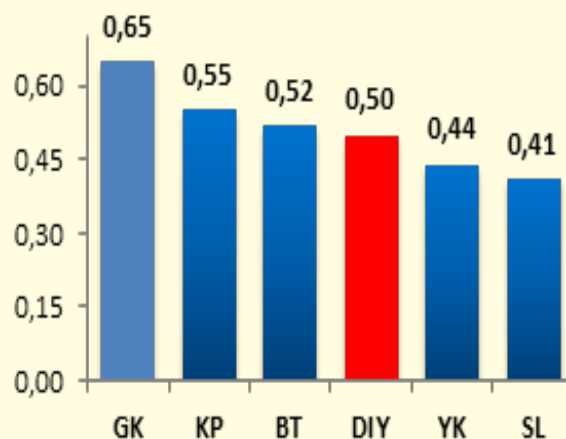
e. Dimensi Perlindungan Sosial

Dimensi terakhir dalam pengukuran indeks IGI adalah dimensi perlindungan sosial. Dimensi ini mengukur seberapa besar akses yang dimiliki penduduk suatu wilayah terhadap perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah, baik dari pusat maupun daerah dalam bentuk bantuan sosial. Dimensi ini menyediakan tempat bagi hal-hal yang terkait dengan penduduk miskin yang lebih ekstrim atau parah, yang sangat sulit untuk memperoleh kesempatan yang disediakan oleh pertumbuhan yang inklusif (BPS,2013). Hanya saja, data yang tersedia dengan baik ialah persentase penduduk/rumah tangga yang memperoleh manfaat dari program *pro poor* pemerintah seperti pelayanan kesehatan gratis, beras murah/raskin dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap total penduduk/rumah tangga.

Oleh karena keterbatasan ketersediaan data dalam periode kajian dari indikator-indikator tersebut, dan data yang paling tersedia dengan baik di semua kabupaten/kota di DIY adalah rumah tangga penerima beras untuk rumah tangga miskin (raskin) maka dalam analisis ini digunakan dua indikator, yaitu persentase rumah tangga penerima raskin dan rata-rata jumlah raskin yang diterima per bulan.

Selama periode kajian, 2011-2015 jumlah rumah tangga penerima raskin di Kulon Progo berkisar antara 48 persen sampai dengan 61 persen, di Bantul 41-51 persen, Gunungkidul 72-85 persen, Sleman 22-33 persen, dan di Yogyakarta 14-22 persen. Sementara untuk level provinsi jumlah rumah tangga penerima raskin berkisar antara 40-47 persen. Pada tahun 2015, persentase rumah tangga penerima raskin di tiga kabupaten, yaitu Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul ada di atas persentase provinsi yang sebanyak 39,96 persen.

Gambar 4.10. Indeks Dimensi Perlindungan Sosial
Kabupaten/Kota se D.I.Yogyakarta, 2015

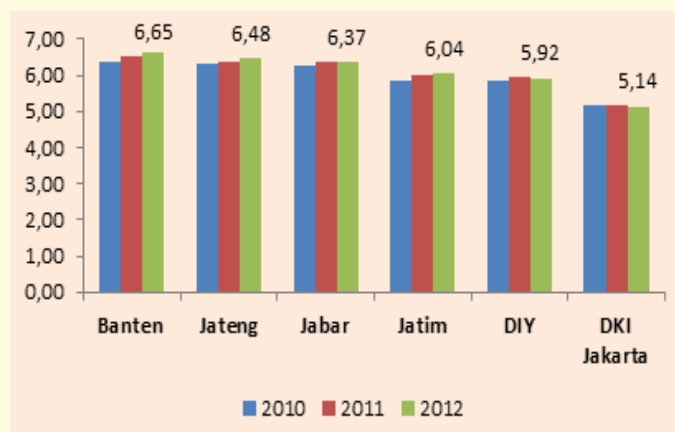


Sumber: Hasil Olahan

4.4. Perbandingan IGI D.I. Yogyakarta dengan provinsi lainnya se-Pulau Jawa

BPS RI melakukan penghitungan IGI pada tahun 2013 dengan tahun periode hitungan 2010-2012. Catatan lain mengenai hitungan BPS tahun 2013 bahwa PDB/PDRB masih menggunakan tahun dasar 2000. Sehingga, untuk tahun yang sama sub-dimensi pertumbuhan ekonomi hasil kajian BPS RI tersebut tidak bisa dibandingkan dengan hasil kajian analisis BPS Provinsi D.I. Yogyakarta yang sudah menggunakan PDRB tahun dasar 2010.

Gambar 4.11. Perbandingan Nilai IGI Provinsi se-Pulau Jawa, 2010- 2012



Sumber : BPS RI, 2013

Hasil perhitungan IGI provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2012 oleh BPS RI (2013) menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta tergolong memuaskan. Namun demikian, secara berturut-turut sejak 2010 hingga pada tahun 2012 perolehan skor IGI D.I. Yogyakarta hanya menembus level 5,92 sehingga hanya menempatkan posisi kualitas pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta sebagai yang terendah kedua setelah DKI Jakarta (skor 5,14) di antara provinsi lainnya di Pulau Jawa. Setelah tahun 2013 BPS belum melakukan perhitungan IGI lagi, oleh karenanya perbandingan provinsi yang dilakukan di sini adalah hanya untuk kondisi 2010-2012.

Secara lebih rinci pada Tabel 4.10, faktor penunjang IGI D.I. Yogyakarta ini pada dua dimensi, yakni dimensi kapabilitas manusia dan dimensi kesetaraan gender. Pada kedua dimensi ini, D.I. Yogyakarta menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) D.I. Yogyakarta yang tertinggi se-Pulau Jawa setelah DKI Jakarta. Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menempati urutan kedua secara nasional, setelah DKI Jakarta pada tahun 2009-2011 (Bappenas: 2013 dan BPS:2011).

Namun, D.I. Yogyakarta masih tertinggal pada ketiga dimensi lainnya dibanding provinsi lain di Pulau Jawa. Sebagaimana pada penjelasan di atas, tantangan inklusivitas pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta berada pada permasalahan dimensi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pada kedua dimensi ini, D.I. Yogyakarta berada pada peringkat kelima dan keenam se-Pulau Jawa. Terakhir pada dimensi perlindungan sosial, share bantuan sosial D.I.Yogyakarta juga masih tertinggal dengan posisi keempat diantara enam provinsi di Pulau Jawa.

Tabel 4.10. Perbandingan IGI menurut Dimensi D.I. Yogyakarta dan provinsi lain se-Pulau Jawa, 2012

Sub-dimensi	Banten	Jateng	Jabar	Jatim	D.I. Yogyakarta	DKI Jakarta
Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Produktif, &Infrastruktur ekonomi	2,81	2,99	2,85	2,58	2,40 (5)	1,83
Kemiskinan &Ketimpangan Pendapatan	1,57	1,45	1,52	1,50	1,43 (6)	1,43
Kesetaraan Gender	0,41	0,45	0,41	0,45	0,45 (2)	0,44
Kapabilitas Manusia (Kesehatan, Pendidikan dan Sanitasi)	1,11	1,11	1,09	1,11	1,18 (2)	1,25
Perlindungan Sosial	0,75	0,48	0,50	0,40	0,46 (4)	0,19
Total	6,65	6,48	6,37	6,04	5,92 (5)	5,14

Catatan : (...) : menunjukkan peringkat diantara enam provinsi di Pulau Jawa

Sumber : BPS RI, 2013

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab

5

PENUTUP

"Kunci dari pertumbuhan yang inklusif adalah penciptaan peluang melalui pertumbuhan yang berkelanjutan yang dapat diakses oleh semua"

Ali & Zhuang

Halaman ini sengaja dikosongkan

5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, berikut beberapa poin kesimpulan:

1. Kualitas pertumbuhan ekonomi DIY masih perlu ditingkatkan terutama dalam upaya program pengurangan kesenjangan distribusi pendapatan dan juga kesenjangan pendapatan antarkabupaten/kota.
2. Pertumbuhan ekonomi relatif selaras dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, kesetaraan gender, kualitas kesehatan, dan kualitas pendidikan, dan kemudahan akses air dan sanitasi. Namun demikian program perlindungan sosial belum menemukan model yang tepat untuk menjangkau sasaran.
3. Pertumbuhan ekonomi DIY memuaskan tetapi belum inklusif. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh belum dibarengi oleh penurunan yang nyata kesenjangan distribusi pendapatan serta belum meratanya distribusi pendapatan antarkabupaten/kota, *share* pendapatan 60 persen terendah dari populasi penduduk masih rendah (di bawah 30 persen), belum adanya peningkatan yang signifikan *share* sektor industri, jasa, dan pertanian, peningkatan *share* tenaga kerja industri juga belum signifikan, dan *share* tenaga kerja berusaha sendiri dan pekerja keluarga tidak dibayar juga belum menunjukkan peningkatan yang nyata.
4. Pertumbuhan inklusif DIY memuaskan namun masih pada level menengah, sehingga berdasarkan hasil kajian BPS RI tahun 2013 capaian D.I. Yogyakarta ini kurang menggembirakan dengan berada pada posisi terbawah kedua, hanya di atas DKI Jakarta di antara provinsi lain se-Pulau Jawa.
5. Tujuan pembangunan ekonomi pada hakekatnya tidak hanya mencapai pertumbuhan yang tinggi tetapi juga bagaimana pertumbuhan yang tinggi tersebut dapat merata pada seluruh wilayah kabupaten/kota di DIY. Pertumbuhan inklusif semua kabupaten/kota memuaskan namun kurang merata karena IGI yang dicapai pada kisaran angka 5,56-6,70 (tahun 2015).
6. Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pengurangan kemiskinan, namun masih menyisakan permasalahan yaitu kesenjangan kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan serta belum meratanya distribusi pendapatan.
7. Dimensi kesetaraan gender dan kapabilitas manusia mencapai indeks kepuasan yang relatif tinggi. Tingginya indeks dimensi kesetaraan gender menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesempatan perempuan dalam akses pendidikan dan akses perempuan ke lapangan usaha formal nonpertanian. Sementara tingginya indeks kepuasan dimensi kapabilitas manusia menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap kesehatan,

pendidikan, dan sanitasi cukup memadai.

5.2. Rekomendasi Hasil Analisis

1. Prioritas penanganan yang masih menjadi “pekerjaan rumah” untuk pembangunan D.I. Yogyakarta agar mencapai pertumbuhan yang inklusif yang sejajar atau bahkan lebih baik dengan provinsi lain ialah meneruskan program percepatan laju penurunan kemiskinan.
2. Menemukan terobosan kebijakan dan implikasi program yang tepat dalam upaya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk dan tingkat ketimpangan pendapatan antarkabupaten/kota. Seperti diketahui bahwa dengan indikator PDRB per kapita terlihat ada kesenjangan yang cukup lebar, yaitu PDRB per kapita Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul jauh di bawah Yogyakarta dan Sleman.
3. Masih perlu didorong upaya peningkatan peran tenaga kerja produktif sehingga selanjutnya diharapkan akan mampu meningkatkan porsi bagian “kue ekonomi” hasil pembangunan bagi golongan 60 persen penduduk berpendapatan terendah.
4. Pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan di semua sektor juga masih perlu ditingkatkan agar level inklusivitas pertumbuhan ekonomi DIY lebih dari memuaskan melebihi level dan kualitas yang dicapai saat ini. Hal ini berkaitan erat juga dengan upaya untuk mewujudkan misi kedua pembangunan DIY 2012-2017 yaitu menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif, dan kreatif.

5.3. Keterbatasan dalam Kajian Analisis Ini

Kajian analisis ini merupakan kajian awal mengenai inklusivitas pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta. Mengingat metodologi pengukuran IGI masih dalam taraf pengembangan oleh ADB dan BPS RI serta pihak-pihak lainnya, maka hasil kajian analisis ini masih terdapat beberapa kelemahan, terutama mengenai besaran penimbang yang harus digunakan. Selain itu, terdapat beberapa indikator yang digunakan oleh ADB namun tidak tersedia, sehingga digunakan indikator *proxy* yang diharapkan dapat mewakili suatu sub-dimensi atau dimensi. Di samping itu dalam kajian ini juga memasukkan indikator yang relevan dengan kondisi DIY. Hal ini berakibat pada hasil pengukuran indeks IGI yang mungkin tidak menggambarkan kondisi riil secara valid, khususnya pengukuran indeks antarkabupaten. Demikian pula untuk memperoleh hasil yang valid, data dasar untuk penghitungan masih perlu diperluas cakupan sampelnya sehingga lebih representatif menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Untuk itu, kajian ini akan terus diperbaiki baik dari sisi metodologi maupun ketersediaan indikator pembentuknya.

Berdasarkan masukan dari berbagai narasumber sebenarnya indikator yang digunakan dalam dimensi perlindungan sosial masih perlu diperbaiki, namun karena adanya keterbatasan ketersediaan data maka saran perbaikan tersebut menjadi pekerjaan rumah dan rujukan kajian di waktu mendatang.

5.4. Catatan Penutup: Mengapa Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Perlu Diukur?

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai tujuan pelaksanaan pembangunan di suatu negara atau wilayah hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan. Salah satu hakikat paradigma pembangunan masa lalu, yaitu *trickle-down effect* yang diharapkan dapat diperoleh secara paralel dengan pelaksanaan pembangunan ternyata tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah tercapai, ternyata permasalahan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan tidak serta merta dapat diselesaikan. Penurunan jumlah penduduk miskin yang kecil, pengurangan tingkat pengangguran yang terbatas, bahkan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat semakin melebar. Kondisi ini yang menyebabkan kualitas pertumbuhan ekonomi dipertanyakan.

Beberapa tahun ini, beberapa metode telah dikemukakan untuk mengukur seberapa besar kualitas pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai suatu negara atau wilayah. Salah satunya adalah *inklusif growth index* (IGI) yang telah dilakukan oleh ADB untuk mengukur dan membandingkan kualitas pertumbuhan ekonomi antarnegara. Beberapa negara juga telah mengaplikasikan metode tersebut untuk mengukur kualitas pertumbuhan ekonomi negaranya, seperti Cina dan Indonesia. Kajian di Indonesia dilakukan oleh BPS RI pada tahun 2013 dimaksudkan untuk mengukur dan membandingkan kualitas pertumbuhan ekonomi antarprovinsi dengan periode kajian 2010-2012.

Mengingat beberapa indikator yang digunakan oleh ADB dan BPS RI datanya tidak tersedia dengan baik atau tidak relevan dengan kondisi di DIY, maka digunakan indikator-indikator pengganti atau menambahkan beberapa indikator yang diharapkan mampu mewakili sub-dimensi maupun dimensi yang diukur. Penyesuaian beberapa indikator juga dilakukan untuk pengukuran Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dalam kajian ini. Namun, berkaitan dengan besaran penimbang, kajian ini tetap menggunakan penimbang yang digunakan oleh ADB dan BPS RI. Hal ini karena tujuan kajian analisis ini tidak hanya untuk mengukur indeks tersebut pada level provinsi dan kabupaten, tetapi juga untuk mengetahui posisi kualitas pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. And J. Zhuang. 2007. *Inklusif Growth toward a Prosperous Asia: Policy Implications*. ERD Working Paper Series, No. 97. Manila: ADB.
- Aviliani. 2010. *Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas*. Jurnal Sekretariat Negara RI, No. 17. Agustus 2010.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta dan Bappeda D.I. Yogyakarta. 2016. *Analisis PDRB 2011-2015*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik RI. 2013. *Analisis Pertumbuhan Inklusif 2013*. Badan Pusat Statistik RI. Jakarta.
- Bappenas RI. 2014. *Rencana Teknokratik RPJMN 2015-2019*. Jakarta.
- Coughlan, Sophie., Lehman, Fabrice., and Lehman, Jean-Pierre. 2009. *Inklusif Growth: The Road for Global Prosperity and Stability*. The ICC CEO Regional Forum, New Delhi, 4 December 2009.
- Harefa, Mandala. 2015. *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. Jakarta.
- Harian Bisnis Indonesia, 3 November 2014. Halaman 1.
- Hudayana, I. 2014. *Analisis Indeks Pertumbuhan Inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmiah Populer Statistika Vol. 2 Nomor 1 Maret 2014. Yogyakarta.
- McKinley, Terry. 2010. *Inklusif Growth Criteria and Indicators: an Inklusif Growth Index for of Country Progress*. ADB Sustainable Development Working Paper Series, No. 14, June 2010.
- Nafziger, E. Wayne. 2006. *Economic Development Fourth Edition*. Kansas State University. Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York.
- Okamoto, Y. and F. Sjöholm. 2001. *Technology Development Indonesia*. Working Paper No. 124, the European Institute of Japanese Studies.
- Today, Michael P., Smith Stephen C. 2015. *Economic Development*. 12th Edition. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. New York University and The George Washington University.

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran 1. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota dan DIY, Tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota	2011		2012		2013		2014		2015	
	IGI	Capaian	IGI	Capaian	IGI	Capaian	IGI	Capaian	IGI	Capaian
Kulon Progo	5,66	Memuaskan	5,83	Memuaskan	5,88	Memuaskan	5,93	Memuaskan	5,87	Memuaskan
Bantul	6,32	Memuaskan	6,48	Memuaskan	6,51	Memuaskan	6,54	Memuaskan	6,50	Memuaskan
Gunungkidul	5,49	Memuaskan	5,60	Memuaskan	5,65	Memuaskan	5,71	Memuaskan	5,70	Memuaskan
Sleman	6,64	Memuaskan	6,75	Memuaskan	6,79	Memuaskan	6,77	Memuaskan	6,61	Memuaskan
Yogyakarta	6,77	Memuaskan	6,80	Memuaskan	6,88	Memuaskan	6,89	Memuaskan	6,82	Memuaskan
D.I. Yogyakarta	6,20	Memuaskan	6,31	Memuaskan	6,39	Memuaskan	6,45	Memuaskan	6,35	Memuaskan

Keterangan:

Kurang Memuaskan : 0-3 Sangat Memuaskan : 8-10
Memuaskan : 4-7

Lampiran 2. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota dan DIY, Tahun 2011-2015: Indeks Dimensi 1 dan Dimensi 2

Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi 1 Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Produktif, dan Infrastruktur Ekonomi					Indeks Dimensi 2 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Kulon Progo	2,63	2,67	2,66	2,61	2,735	0,72	0,73	0,82	0,86	0,93
Bantul	2,98	3,02	3,05	3,03	3,09	0,98	1,00	1,02	1,04	1,12
Gunungkidul	2,49	2,54	2,50	2,49	2,57	0,73	0,75	0,81	0,85	0,88
Sleman	3,09	3,18	3,23	3,22	3,16	1,23	1,22	1,27	1,28	1,26
Yogyakarta	3,17	3,15	3,19	3,22	3,24	1,24	1,30	1,29	1,31	1,30
D.I. Yogyakarta	2,95	2,99	3,01	3,00	3,01	0,95	0,94	1,02	1,07	1,09

Lampiran 3. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota dan DIY, Tahun 2011-2015: Indeks Dimensi 3 dan Dimensi 4

Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi 3 Kesesetaraan Gender					Indeks Dimensi 4 Kapabilitas Manusia				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Kulon Progo	0,44	0,45	0,45	0,48	0,43	1,23	1,27	1,26	1,23	1,22
Bantul	0,44	0,45	0,44	0,44	0,45	1,32	1,31	1,34	1,34	1,31
Gunungkidul	0,42	0,43	0,44	0,42	0,39	1,12	1,12	1,15	1,20	1,20
Sleman	0,45	0,43	0,44	0,44	0,43	1,35	1,36	1,35	1,37	1,35
Yogyakarta	0,48	0,47	0,48	0,47	0,47	1,37	1,39	1,39	1,39	1,36
D.I. Yogyakarta	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	1,29	1,29	1,30	1,32	1,30

Lampiran 4. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Tahun 2011-2015: Indeks Dimensi 5

Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi 5 Perlindungan Sosial				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kulon Progo	0,65	0,70	0,70	0,74	0,55
Bantul	0,60	0,70	0,66	0,68	0,52
Gunungkidul	0,73	0,76	0,75	0,75	0,65
Sleman	0,52	0,57	0,50	0,46	0,41
Yogyakarta	0,50	0,50	0,53	0,50	0,44
D.I. Yogyakarta	0,56	0,63	0,60	0,61	0,50

Lampiran 5. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 33 Provinsi dan Indonesia ,Tahun 2010-2012

Provinsi	2010		2011		2012	
	IGI	Capaian	IGI	Capaian	IGI	Capaian
Aceh	5,79	Memuaskan (2)	5,98	Memuaskan (2)	5,99	Memuaskan (2)
Sumatera Utara	5,90	Memuaskan (2)	5,87	Memuaskan (2)	5,82	Memuaskan (2)
Sumatera Barat	5,94	Memuaskan (2)	5,92	Memuaskan (2)	6,08	Memuaskan (2)
Riau	4,96	Memuaskan (2)	5,07	Memuaskan (2)	5,09	Memuaskan (2)
Jambi	5,73	Memuaskan (2)	5,68	Memuaskan (2)	5,71	Memuaskan (2)
Sumatera Selatan	5,46	Memuaskan (2)	5,45	Memuaskan (2)	5,48	Memuaskan (2)
Bengkulu	5,81	Memuaskan (2)	5,78	Memuaskan (2)	5,88	Memuaskan (2)
Lampung	5,77	Memuaskan (2)	5,92	Memuaskan (2)	5,93	Memuaskan (2)
Bangka Belitung	6,06	Memuaskan (2)	6,33	Memuaskan (2)	6,13	Memuaskan (2)
Kepulauan Riau	6,32	Memuaskan (2)	6,22	Memuaskan (2)	6,34	Memuaskan (2)
DKI Jakarta	5,17	Memuaskan (2)	5,19	Memuaskan (2)	5,14	Memuaskan (2)
Jawa Barat	6,27	Memuaskan (2)	6,34	Memuaskan (2)	6,37	Memuaskan (2)
Jawa Tengah	6,29	Memuaskan (2)	6,38	Memuaskan (2)	6,48	Memuaskan (2)
DI Yogyakarta	5,86	Memuaskan (2)	5,96	Memuaskan (2)	5,92	Memuaskan (2)
Jawa Timur	5,87	Memuaskan (2)	5,98	Memuaskan (2)	6,04	Memuaskan (2)
Banten	6,38	Memuaskan (2)	6,52	Memuaskan (2)	6,65	Memuaskan (2)
Bali	6,11	Memuaskan (2)	6,41	Memuaskan (2)	6,47	Memuaskan (2)
Nusa Tenggara Barat	5,28	Memuaskan (2)	4,93	Memuaskan (2)	5,22	Memuaskan (2)
Nusa Tenggara Timur	5,84	Memuaskan (2)	5,86	Memuaskan (2)	5,99	Memuaskan (2)
Kalimantan Barat	5,82	Memuaskan (2)	5,93	Memuaskan (2)	5,94	Memuaskan (2)
Kalimantan Selatan	5,97	Memuaskan (2)	6,00	Memuaskan (2)	5,89	Memuaskan (2)
Kalimantan Tengah	5,95	Memuaskan (2)	5,97	Memuaskan (2)	5,99	Memuaskan (2)
Kalimantan Timur	5,60	Memuaskan (2)	5,59	Memuaskan (2)	5,59	Memuaskan (2)
Sulawesi Utara	5,74	Memuaskan (2)	5,74	Memuaskan (2)	5,78	Memuaskan (2)
Sulawesi Tengah	5,90	Memuaskan (2)	6,01	Memuaskan (2)	6,01	Memuaskan (2)
Sulawesi Selatan	5,95	Memuaskan (2)	6,14	Memuaskan (2)	6,15	Memuaskan (2)
Sulawesi Tenggara	5,86	Memuaskan (2)	6,02	Memuaskan (2)	6,11	Memuaskan (2)
Gorontalo	5,69	Memuaskan (2)	5,79	Memuaskan (2)	5,90	Memuaskan (2)
Sulawesi Barat	6,53	Memuaskan (2)	6,26	Memuaskan (2)	6,44	Memuaskan (2)
Maluku	5,53	Memuaskan (2)	5,57	Memuaskan (2)	5,71	Memuaskan (2)
Maluku Utara	5,84	Memuaskan (2)	5,75	Memuaskan (2)	5,84	Memuaskan (2)
Papua Barat	6,62	Memuaskan (2)	6,61	Memuaskan (2)	6,33	Memuaskan (2)
Papua	3,61	Kurang Memuas- kan (1)	3,57	Kurang Memuas- kan (1)	4,01	Memuaskan (2)
INDONESIA	5,80	Memuaskan (2)	5,88	Memuaskan (2)	5,92	Memuaskan (2)

Keterangan:

Kurang Memuaskan : 0-3 Sangat Memuaskan : 8-10

Memuaskan : 4-7

Sumber: BPS RI, Analisis Statistik Lintas Sektor - Analisis Pertumbuhan Inklusif 2013

